

**PETANI MELAWAN KERATON YOGYAKARTA:  
MENGUNGKAP KONTRIBUSI PEREMPUAN PETANI  
KULON PROGO DI DALAM KONFLIK**



Oleh:  
Miftahul Huda  
NIM: 18.200.010.246

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
TESIS  
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

**YOGYAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 18200010246  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Miftahul Huda, S.H.

NIM: 18200010246

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 18200010246  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Miftahul Huda, S.H.

NIM: 18200010246

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-252/Un.02/DPP/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : PETANI MELAWAN KERATON YOGYAKARTA: MENGUNGKAP KONTRIBUSI PEREMPUAN PETANI KULON PROGO DI DALAM KONFLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL HUDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010246  
Telah diujikan pada : Senin, 24 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 00492ba094c2



Penguji II  
Dr. Nina Mariani Nour, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 8065c3131e47b



Penguji III  
Dr. Witriani, S.S. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60d8e660e0c7



Yogyakarta, 24 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60d8e660e0c7

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Petani Melawan Keraton Yogyakarta: Mengungkap Kontribusi Perempuan Petani Kulon Progo di dalam Konflik**

yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Huda, S.H.  
NIM : 18200010246  
Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Art (M.A.)*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Mei 2021

Pembimbing,



**Dr. Phil. Dewi Candraningrum, M.Ed.**



**Sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi tekaning pati**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



*Untuk petani Kulon Progo yang terus berjuang  
mempertahankan hak atas ruang hidup.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Konflik di atas pasir besi Kulon Progo selama ini dipahami antara petani melawan tambang pasir besi. Namun pada dasarnya, kepemilikan otoritas menjadi sumber utama konflik itu terjadi. Dengan demikian, petani sedang berada di arena melawan otoritas Keraton Yogyakarta dengan kebijakan tambang pasir besinya. Sementara itu, dalam pemikiran ekofeminisme dan feminisme budaya, posisi perempuan petani dipandang sebagai penerima beban gender alamiah dan pembersih kekacauan alam. Pemahaman *mainstream* ini membawa perempuan kehilangan subjektivitasnya, esensialis; dan di saat yang sama, ditempatkan berhadapan-hadapan dengan laki-laki, budaya Jawa, sekaligus Keraton. Hal itu berdampak buruk bagi perempuan petani di dalam konflik, terutama dengan keterlibatan mereka di dalam gerakan sosial: kontribusinya tidak terlihat, perannya tidak diperhitungkan, dan dianggap mengafirmasi beban gender.

Penelitian ini mencoba mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam konflik dan relasinya dengan kreator konflik, yaitu Keraton Yogyakarta. Kemudian untuk mengakui keterlibatan perempuan di dalam konflik, penelitian ini menggunakan teori konflik dan otoritas; sedangkan untuk mengetahui kontribusinya di dalam konflik, digunakan teori identitas perempuan dan ekofeminisme serta politik lokasi. Ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan etnografi feminis sebagai metode untuk mengungkap kontribusi perempuan secara langsung. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, menggunakan teknik *snowball sampling*, wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur, mengkode data, dan menganalisisnya secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, perempuan petani menyelami budaya Jawa untuk bisa berkontribusi di dalam konflik. Islam, Jawa, perempuan, dan petani adalah kumpulan identitas yang membuat perempuan petani menyadari ancaman tambang. Dan, melalui ritual *slametan*, perempuan mampu mengintervensi tafsir sosial budaya Jawa dan menjadikannya saluran perlawanan perempuan terhadap Keraton Yogyakarta dan tambang pasir besi.

**Kata kunci:** *budaya Jawa, Keraton Yogyakarta, tambang pasir besi, perempuan petani, subjektivitas perempuan.*



## ABSTRACT

The conflict going on iron sand beach, Kulon Progo, has been understood as a battle between farmers against iron ore mines. But basically, ownership of authority becomes the main source of the conflict. Thus, farmers are in the arena against the authority of the Yogyakarta Palace with its iron ore mining policy. Meanwhile, in ecofeminism and cultural feminism thoughts, the position of female farmer is seen as the recipient of natural gender burdens and cleaners of natural chaos. This general sense makes women lose their subjectivity, essentialist; and at the same time, placed face to face with men, Javanese culture, as well as the Yogyakarta Palace. It adversely affects female farmer in conflict, especially with their involvement in social movements: their contributions are invisible, their roles are not taken into account, and are considered to affirm the burden of gender.

This research tried to uncover the contribution of female farmers in the conflict and its relationship with the creators of the conflict, namely the Yogyakarta Palace. Then to acknowledge women's involvement in conflict, the study used conflict theory and authority; while to know its contribution in the conflict, used the theory of female identity, ecofeminism and politics of location. This was a type of qualitative research with feminist ethnography as a method of uncovered women's contributions directly. The steps were, used snowball sampling techniques, in-depth and unstructured interviewed, coded the data, and analyzed it inductively.

The results of this study shows that women farmers dive into Javanese culture to be able to contribute to the conflict. Islam, Javanese, women, and farmers are a collection of identities that make women farmers aware of the threat of mining. And, through slametan rituals, women are able to intervene in Javanese socio-cultural interpretations and make it a bridge of women's resistance to Yogyakarta palace and iron ore mines.

**Keywords:** female farmers, female subjectivity, iron ore mines, Javanese culture, Yogyakarta Palace.

## KATA PENGANTAR

Tesis yang berjudul “Petani Melawan Keraton Yogyakarta: Mengungkap Kontribusi Perempuan Petani Kulon Progo di dalam Konflik” ini mampu diselesaikan di waktu yang tepat berkat dukungan dari berbagai pihak. Tentunya yang utama adalah panjatan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dia-lah yang menjadi petunjuk dan penguat selama saya mengerjakan tesis ini.

Terimakasih yang mendalam saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga besar saya karena telah memanjatkan doa paling tulus demi kelancaran perkuliahan dan pengerjaan tesis ini, serta telah memberi sumbangan moril dan materil. Berkat kesabaran mereka dalam menunggu dan berharap, akhirnya menjadi unsur semangat saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para petani Kulon Progo dan organisasi PPLP-KP, khususnya perempuan petani, yang telah banyak membantu saya ketika melakukan penelitian. Keramahan, keteguhan, kegigihan, dan kepedulian kepada sesama, adalah pelajaran berharga yang saya dapat dari para petani, hingga menyadari saya bahwa pengerjaan tesis ini bukan semata-mata kepentingan akademis saya pribadi, tapi juga ada hal-hal tersembunyi dari petani yang perlu diungkap dan diketahui oleh publik dan khususnya akademisi. Permintaan maaf perlu saya sampaikan juga karena tidak bisa menyebut nama dan kebaikan petani satu per satu—meskipun sangat ingin—karena demi menjaga privasi dan keamanan petani dalam mempertahankan kehidupan di atas pasir besi.

Kepada teman-teman PPM Aswaja Nusantara kompleks Baciro, yang berkenan menyediakan ruang-ruang diskusi kecil seputar tesis ini, saya ucapkan

terimakasih yang tak terkira. Ruang tersebut sangat berharga di saat pandemi membatasi ruang-ruang diskusi di Jogja dan mobilitas untuk bergerak mencari teman diskusi secara luring. Tak lupa juga ucapan terimakasih saya sampaikan secara khusus kepada Rizky Fadil dan Moh. Ainu Rizqi karena telah membantu dalam proses penelitian tesis ini.

Terimakasih juga kepada teman-teman Islam dan Kajian Gender (IKG) UIN Sunan Kalijaga 2018-2019 yang memberi dukungan moril dan membantu membuka wawasan saya tentang kajian gender. Juga atas kesediaannya menjadi suka bersantai dan istirahat dari kerumitan hal-hal akademik sekaligus menjadi alarm bagi tesis ini. Tanpa mereka, saya akan mengalami tekanan berat selama perkuliahan dan pengerjaan tesis ini.

Banyak terimakasih juga saya sampaikan kepada para dosen Intersiplinary Islamic Studies (IIS), konsentrasi Islam dan Kajian Gender, karena telah mendidik dengan penuh kesabaran. Tidak lupa terimakasih kepada rektor UIN Sunan Kalijaga, Direktur Pascasarjana, Kaprodi IIS, dan khususnya Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., sebagai dosen penasihat selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Dan, kepada Dr. Phil. Dewi Candraningrum, M.Ed., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam mengerjakan tesis ini hingga selesai, saya sampaikan banyak terimakasih.

Terakhir, terimakasih kepada para pembaca yang meluangkan waktunya untuk mengkritisi tesis ini. Saya berharap temuan ini memiliki sumbangan akademis dan pemikiran yang bermutu bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian, saya berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada

masyarakat umum. Tentunya, yang paling saya harapkan adalah kritik dan saran dari pembaca terhadap tesis ini agar dapat diperbaiki, dan kepada saya pribadi agar dapat lebih baik dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Demak, 6 Mei 2021

Miftahul Huda



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Tā' marbūṭah**



Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiii
DAFTAR ISTILAH .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretis.....	22
1. Konflik dan Otoritas.....	22
2. Politik Identitas Perempuan dan Ekofeminisme .....	26
3. <i>Politics of Location</i> : Memperkuat Gerakan Perempuan Lokal .....	29
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Pembahasan.....	38

BAB II PETA KONFLIK ANTARA PETANI DAN KERATON YOGYAKARTA .....	40
A.    Kilas Sejarah Penguasaan Tanah Oleh Keraton Yogyakarta.....	41
1.    Status Pertanahan Pra-Kemerdekaan .....	42
2.    Status Pertanahan Pasca-Kemerdekaan.....	48
B.    Ekologi Kulon Progo dalam Cengkeraman Keraton .....	51
1.    Keraton Sebagai Otoritas Budaya .....	53
2.    Kondisi Geografi Kulon Progo .....	57
3.    Keraton Mengklaim Pasir Besi: Terbitnya Konsesi Tambang.....	59
4.    Gerakan Petani Melawan Otoritas .....	62
C.    Posisi Perempuan Petani di Dalam Konflik.....	64
1.    Konstruksi Gender dalam Budaya Jawa .....	64
2.    Membangun Kulon Progo: Mengopresi Perempuan Petani dan Alam .	70
D.    Kesimpulan .....	73
 BAB III MENYUSUN IDENTITAS PEREMPUAN PETANI JAWA .....	76
A.    Mengenali Diri Melalui Budaya Jawa .....	77
1. <i>Slametan</i> : Membentuk Solidaritas Petani .....	79
2.    Pencarian Identitas Melalui Ritus <i>Slametan</i> .....	89
3.    Identitas Perempuan Petani dalam Ritual <i>Puputan</i> .....	93
B.    Mitologi: Mencari Makna Keselamatan yang Lebih Radikal.....	97
1.    Dewi Sri: Mitos dan Relasi Manusia-Alam .....	98
2.    Radikalisasi <i>Slamet</i> .....	103
C.    Kesimpulan .....	107
 BAB IV PERAN GENDER DAN PERLAWANAN PEREMPUAN PETANI .	108
A.    Drama dan Ironi di Atas Pasir Besi.....	110
1.    Tambang, Keraton, dan Pasir Besi dalam Rekaman Perempuan .....	110
2.    Perempuan dalam Lanskap Pertanian .....	116
3.    Badai Pandemi COVID-19 di Lahan Pertanian .....	124
4.    Pandemi COVID-19: Era Baru Keraton bersama Tambang.....	129
B.    Mengurai Pola Peran Gender Perempuan Petani .....	133

1. “Seks” dan Belenggu Moralitas .....	134
2. Pelembagaan Hierarki Gender .....	139
C. Menari di Atas Pasir Besi: Mengapa Perempuan Memilih Bertani? ....	141
D. Kesimpulan .....	145
BAB V SUBJEKTIVITAS PEREMPUAN DI DALAM GERAKAN SOSIAL: SEBUAH KESIMPULAN .....	147
A. Menolak Subordinasi Gender .....	148
B. Gerakan Perempuan Lokal: Melebur dalam Budaya Jawa, Menyatu dengan Alam .....	150
C. Masa Depan Perempuan di dalam Gerakan Sosial .....	153
DAFTAR PUSTAKA .....	155
CURICULUM VITAE .....	171



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> Struktur Kesultanan Yogyakarta tahun 2017.....	57
<b>Gambar II.2</b> Peta Kabupaten Kulon Progo .....	59
<b>Gambar III.1</b> Gunungan dalam Perayaan Ulang Tahun PPLP-KP ke-13.....	86
<b>Gambar III.2</b> Panggung Ulang Tahun PPLP-KP ke-13 .....	89
<b>Gambar III.3</b> Topan bersama Istrinya sedang mencampurkan pupuk yang telah dipilih dan diolah ke dalam sumur renteng. ....	96
<b>Gambar III.4</b> Flyer Panen Raya 2013 PPLP-KP.....	103
<b>Gambar III.5</b> Kerangka konseptual untuk menginterpretasikan revolusi ekologi .....	104
<b>Gambar IV.1</b> Petani perempuan sedang menyirami tanaman .....	122
<b>Gambar IV.2</b> Anggota PPLP-KP memasang spanduk penolakan tambang pasir besi di Kulon Progo.....	128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b> Jumlah Sertifikat Tanah Sultan Ground _____	50
<b>Tabel II.2</b> Luas penguasaan dan kepemilikan tanah swapraja di DIY _____	51
<b>Tabel II.3</b> Pemanfaatan tanah di Kabupaten Kulon Progo _____	58
<b>Tabel III.1</b> Data Penduduk berdasarkan agama yang dianut perkecamatan semester 2 tahun 2017 _____	80



## DAFTAR SINGKATAN

BBM	=	Bahan Bakar Minyak
BPR	=	Bank Perkreditan Rakyat
COVID	=	Corona Virus Disease
Dispertaru	=	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
DIY	=	Daerah Istimewa Yogyakarta
DPD	=	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-RI	=	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ESDM	=	Energi dan Sumber Daya Mineral
GKR	=	Gusti Kanjeng Ratu
HB	=	Hamengku Buwono/Hamengku Bawono
JJLS	=	Jalur Jalan Lintas Selatan
JMI	=	Jogja Magasa Iron
JMM	=	Jogja Magasa Mining
KHP	=	Kawedanan Hageng Punokawan
KKP	=	Kawasan Peruntukan Pertambangan
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mdpl	=	Meter di atas permukaan laut
NDK	=	Negara Dunia Ketiga
NDP	=	Negara Dunia Pertama
Orba	=	Orde Baru
PAG	=	Paku Alam Ground/ <i>Pakualamat Ground</i>
Perdais	=	Peraturan Daerah Istimewa
Persit	=	Persatuan Istri Tentara
PHK	=	Pemutusan Hubungan Kerja
PKK	=	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PLN	=	Pembangkit Listrik Negara
PLTU	=	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PPLP-KP	=	Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

PT	=	Perseroan Terbatas
RT	=	Rukun Tetangga
RTRW	=	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RUU	=	Rancangan Undang-Undang
RW	=	Rukun Warga
SD	=	Sekolah Dasar
SG	=	Sultan Ground/ <i>Sultanat Ground</i>
SPJ	=	Solidaritas Pangan Jogja
TPPKK	=	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
UGM	=	Universitas Gadjah Mada
UU Minerba	=	Undang-Undang Mineral dan Batubara
UUD	=	Undang-Undang Dasar
UUK	=	Undang-Undang Keistimewaan
UUPA	=	Undang-Undang Pokok Agraria
VOC	=	Vereenigde Oostindische Compagnie
WFH	=	<i>Work From Home</i>
WHO	=	World Health Organization

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR ISTILAH

- Abangan* = Orang Jawa yang mempraktekkan ajaran Islam secara terbatas, sinkretis.
- Agrarische wet* = Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870. Berisi tentang hukum administrasi yang mengatur pembagian penguasaan atas tanah oleh pemerintah, masyarakat pribumi, dan non pribumi.
- Antroposentrisme* = Paham yang menempatkan manusia sebagai pusat jagat raya, segala bentuk pembangunan dipusatkan semata-mata untuk kebermanfaatannya manusia dan mengabaikan makhluk lain: hewan dan tumbuhan.
- Bekel* = Jabatan yang mempunyai tugas memungut pajak dari para petani di Kasultanan Ngayogyakarta. Jabatan ini kemudian dihapus pada tahun 1918.
- Berkat* = Makanan/hidangan yang diberikan kepada tamu undangan untuk dibawa pulang setelah selesai ritus *slametan*.
- Buen vivir* = Hak untuk kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik untuk semua orang dengan tanpa ekonomi kompetitif dan tanpa mengorbankan sumber daya alam.
- COVID-19 = Virus yang muncul pertama kali di Cina pada akhir tahun 2019 dan menjadi pandemi global.

- Domein Verklaring* = Kebijakan pertanahan di zaman kolonial Belanda. Sistem ini mengharuskan individu/seseorang yang mengaku pemilik tanah untuk membuktikan kepemilikannya. Jika tidak bisa membuktikan, maka secara otomatis tanah tersebut menjadi milik negara.
- Eigendom* = Hak individu tertinggi, sekaligus hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Barat. Dalam pasal 570 KUH Perdata, hak *eigendom* dijelaskan sebagai hak milik, dan bisa digunakan secara leluasa dan menggunakannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
- Ekofeminisme = Aliran feminisme yang muncul pada gelombang feminisme ketiga. Aliran ini menempatkan alam dan perempuan sebagai entitas yang sama-sama ditindas oleh laki-laki (patriarki). Oleh karenanya, perusakan terhadap alam sama saja menindas perempuan karena adanya keterkaitan erat antara keduanya.
- Feminisme Budaya = Aliran feminis yang meyakini penindasan terhadap perempuan berasal dari hal yang esensial (biologis) sehingga membuatnya terkait dengan alam, sedangkan laki-laki dengan budaya.
- Gender = Peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di ranah sosial, dan keduanya bisa saling bertukar peran; seperti memasak, mencuci, dan bekerja di luar rumah. Sedangkan pasca-



strukturalis menganggap gender sebagai penampilan (peran) yang didasarkan atas jenis kelamin—seks menjadi norma.

- Grebeg Mulud* = Tradisi di Yogyakarta untuk memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Rangkaian acara mulai dari pengajian, syalawatan, dan mengelilingi gunung ke tujuh masjid di Yogyakarta.
- Gunungan* = Aneka makanan atau sayuran yang disusun berbentuk gunung. Biasanya diadakan saat *slametan* atau peringatan panen raya petani sebagai bentuk rasa syukur. Ini juga berarti tradisi/budaya.
- Hegemoni = Hubungan dan bentuk kekuasaan dari kelompok superordinat terhadap kelompok subordinat dengan maksud mengendalikannya. Pengendalian tersebut bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kekuasaan, misalnya birokrasi (politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan) agar dominasinya menjadi formal.
- Hierarki gender = Salah satu gender berada lebih tinggi di atas gender lain. Misalnya, ibu rumah tangga dianggap sebagai kelas dua dibandingkan suami yang bekerja di ruang publik.
- Inferior = Tidak memiliki mutu. Perempuan dalam masyarakat patriarki umumnya menyandang label ini.

- Interseksionalitas = Pertama kali dikenalkan oleh Kimberle Crenshaw pada 1989. Teori ini bertujuan menguarai berbagai penindasan, dominasi, diskriminasi yang bersumbu pada identitas (ras, budaya, gender, agama, orientasi seksual) hingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan.
- Jagat cilik* = Mikrokosmos. Meliputi kelompok kecil manusia yang saling berelasi.
- Jagat gede* = Makrokosmos. Meliputi alam semesta.
- Kapitalisme = Sistem ekonomi yang berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Sistem ekonomi ini cenderung merugikan perempuan dan alam, karena basis ekonominya adalah sumber daya alam yang membutuhkan modal kecil. Sedangkan perempuan dan alam berada dalam satu *frame* ketertindasan.
- Keraton = Keraton (dengan “K” besar) menunjukkan sistem pemerintahan di Yogyakarta yang diperintah oleh sultan (Sebagai gubernur) dan sah secara hukum (otoritas). Sedangkan keraton (dengan “k” kecil) menunjukkan sebuah bangunan yang ditinggali oleh keluarga sultan keturunan Mataram.
- Lungguh* = Tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan jabatannya, berfungsi juga sebagai imbalan jasa. Tanah ini bisa dikelola dan disewakan kepada petani tak bertanah.

- Mitos = Cerita/*folklore* tentang masa lampau yang mengandung tafsir tentang alam semesta. Mitos juga memiliki fungsi konstruktif terhadap relasi sosial masyarakat. Masyarakat memiliki imajinasi kehidupan sesuai cerita dalam mitos, dan berusaha mewujudkannya melalui relasi sosial.
- Moral = Norma yang dibentuk menggunakan standar laki-laki untuk mendisiplinkan tubuh perempuan di dalam masyarakat.
- Negara Dunia Ketiga = Dalam kajian ekofeminisme, Negara Dunia Ketiga adalah negara yang dianggap miskin (atau, Selatan) karena masyarakatnya mengandalkan pertanian (alam) atau ekonomi subsisten.
- Negara Dunia Pertama = Negara yang basis ekonominya adalah industrialisasi, disebut juga sebagai Utara, negara yang makmur. Namun, kemajuan ini adalah hasil dari eksploitasi alam yang memiliki dampak destruktif secara global. Selain itu, Negara Dunia Pertama selalu memamerkan kemajuannya kepada Negara Dunia Pertama, yang sebenarnya tidak mungkin bisa dicapai.
- Otoritas = Posisi yang ditempati oleh seseorang dan *legitimate*. Otoritas tidak merujuk pada individu, tetapi posisi. Otoritas bisa mengeluarkan kebijakan untuk menyeimbangkan status quo. Karena kepemilikan kuasa yang terlegitimasi dan syarat dengan kepentingan, distribusi otoritas menyebabkan munculnya kelompok subordinat

yang berusaha menggoyahkan status quo hingga menciptakan konflik.

- Otoritas Budaya = Kewenangan secara sah dalam menentukan ke mana arah budaya. Kewenangan itu bukan kewenangan kultural, melainkan kewenangan sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena ada produk hukum yang menopangnya.
- Paku Alam Ground* = Disebut juga *Pakualamanaat ground*. Adalah tanah yang dimiliki oleh Kadipaten Pakualaman. Pengakuan ini diakui oleh hukum UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta.
- Patrimonialisme = Sistem kekuasaan yang diwariskan secara turun-menurun mengikuti garis keturunan bapak.
- Paugeran* = Aturan tidak tertulis yang dijalankan Keraton Yogyakarta secara turun-menurun dan tidak bisa diubah. Misalnya, seorang sultan harus laki-laki.
- Puputan* = Bagian dari *slametan*. Ritual ini dilaksanakan setelah pemotongan tali pusar bayi, untuk mendoakan keselamatan bayi.
- Seks = Secara harfiah berarti jenis kelamin. Namun dalam kajian feminisme post-struktural, seks menjadi norma yang menentukan peran gender hingga membentuk budaya.
- Serat kekancingan* = Adalah surat yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta untuk mengatur penggunaan tanah *Sultan Ground* yang memiliki empat jenis

pemakaian: *magersari*, *ngindung*, *anganggo*, dan *anggaduh*.

- Slametan* = Ritual yang menjadi jantung masyarakat Jawa. Biasanya dilaksanakan untuk memperingati ulang tahun, rumah baru, kematian, dll. Dalam prosesinya, menghadirkan seorang kiai untuk bagian doa dan tamu undangan yang dipilih oleh tuan rumah untuk ikut mendoakan agar tercapai keselamatan.
- Subordinat* = Kelas dua. Dalam konflik, kelompok ini yang berusaha menggoyahkan status quo otoritas. Sedangkan dalam kacamata feminisme, perempuan selalu menjadi subordinat di bawah laki-laki. Dus, perempuan di dalam konflik adalah kelompok subordinat di bawah kelompok subordinat.
- Sultan Ground* = Disebut Juga *Sultanaat Ground*. Adalah tanah yang dimiliki oleh Kasultanan yang meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY. Kepemilikan ini diakui oleh hukum, yaitu UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan.
- Vorstenlanden* = Wilayah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Mataram, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
- Zoonosis* = Virus yang bertransmisi dari hewan ke manusia yang disebabkan ruang hidup yang semakin berdekatan. Sedangkan penyebab menyempitnya

ruang hidup hewan dan manusia disebabkan oleh pembangunan dan deforestasi.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Petani merupakan kelompok masyarakat yang telah berabad-abad mengalami tindak pemerasan oleh sistem feodalisme (kerajaan). Sistem tersebut merupakan cara berekonomi yang menempatkan raja, keluarganya, dan para bangsawan sebagai tuan, dan petani sebagai abdi. Dengan kata lain, raja dan para bangsawan menjadi pemilik alat produksi, bahkan rakyat juga milik raja yang tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa.<sup>1</sup> Tidak cukup sampai di situ, kehadiran kolonial Belanda yang memberlakukan kerja paksa juga menambah kesengsaraan petani Jawa.<sup>2</sup>

Sejak dikukuhkannya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengharuskan seluruh daerah di Indonesia tunduk di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak diperkenankan cara berekonomi di bawah feodalisme. Diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang berlaku sejak 24 September 1984<sup>3</sup> menjadi titik terang bagi petani, karenanya kepastian kepemilikan tanah setiap warganegara menjadi jelas. Tujuan dari UUPA

---

<sup>1</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, cetakan kedua. (INSISTPress, 2017), 15.

<sup>2</sup> Kebijakan politik kolonial Belanda pada waktu itu terjadi perdebatan antara memberlakukan kerja paksa atau kerja gratis, karena pertimbangan watak masyarakat Jawa yang dianggap “malas”. Bagaimana pun, kedua pertimbangan tersebut menghamba pada ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi tenaga petani dan syarat dehumanisasi. Selengkapnya baca: Syed Hussein Alatas, *The Myth of the Lazy Native* (London: Frank Cass, 1997), 65-66.

<sup>3</sup> Umar Kusumoharyono, “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5/1960,” *Yustisia* 68 (2006): 1.

adalah untuk menghapus dualisme hukum pertanahan di Indonesia, serta salah satu tujuan dan prinsipnya adalah menghapuskan pemerasan terhadap petani.<sup>4</sup>

Produk hukum tersebut merupakan langkah progresif negara dalam mengatur bidang pertanahan. Namun ada satu daerah di Indonesia yang tidak tersentuh oleh UUPA, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan negara pada Pasal 18 UUD 1945, dan Pasal 18B (UUD 1945 hasil amandemen) yang menghormati hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa, yaitu daerah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman. Pemberian hak khusus tersebut bukan berdasarkan pada rasa terimakasih karena kontribusi politiknya, melainkan murni pengakuan yang objektif dan autentik.<sup>5</sup> Dengan begitu, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keraton<sup>6</sup> sebagai pusat pemerintahannya memiliki wewenang mengatur kepemilikan tanah tanpa mengikuti UUPA, melainkan diatur melalui *Rijkblad* Kasultanan dan Pakualaman.<sup>7</sup>

Kendati hak istimewa tersebut legal, belum tentu menjamin masyarakat akan terintegrasi melalui hukum dan sistem budaya yang ada, sebagaimana menurut Talcott Parsons.<sup>8</sup> Sebaliknya, hak istimewa tersebut menjadi akar masalah konflik

---

<sup>4</sup> Rachman, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, 69.

<sup>5</sup> Mas'udi, "Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 6, accessed June 3, 2020, <http://digilib.uinsby.ac.id/14973/>.

<sup>6</sup> Keraton (dengan "k" kecil) dalam hal ini berarti bangunan tempat sultan menjalankan roda pemerintahannya. Dalam pembahasan lebih lanjut akan ditemui Keraton dengan huruf "K" besar, ini berarti Keraton sebagai sistem pemerintahan, bukan bangunan tempat bernaung Sultan. Klasifikasi ini perlu untuk memudahkan dalam pembahasan lebih lanjut yang fokus pada Kerton sebagai otoritas pemerintahan sebagai sumber konflik.

<sup>7</sup> Tyas Dian Anggraeni, "Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Rechts Vinding* 1, no. 1 (2012): 53.

<sup>8</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, trans. Nurhadi, cetakan ke-10. (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 260.

sosial-ekologi. Wasisto Raharjo Jati<sup>9</sup> menyebutnya sebagai *predatory regime* lokal, sebab Keraton memegang kendali penuh terhadap tata kelola sumber daya alam. Selain itu, tidak adanya hak kepemilikan tanah oleh rakyat di beberapa daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat ketidakpastian jangka panjang. Apalagi Keraton telah menyatakan salah satu daerah menjadi milik kerajaan, yaitu pesisir pantai Kulon Progo yang dinyatakan berada di bawah yuridiksi kerajaan melalui legitimasi kultural.<sup>10</sup> Sedangkan di sana pula telah bernaung para petani yang menggantungkan kehidupannya di atas pantai pasir besi.

Keraton masih mempertahankan adanya *serat kekancingan* (surat yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta untuk mengatur penggunaan *Sultan Ground*) bagi petani untuk menggunakan tanah PAG. Namun apa yang dilakukan Keraton pasca pendakuan tersebut adalah mengizinkan proyek pertambangan pasir besi. Hal tersebut dianggap petani sebagai tindakan kontraproduktif, karena setelah bertahun-tahun pasir besi yang dianggap tandus diolah petani menjadi lahan subur, diganjar Keraton dengan pengalihfungsian lahan. Di sisi lain, ekologi pesisir Kulon Progo juga terancam oleh adanya tambang.<sup>11</sup>

Petani sebagai makhluk rasional tidak begitu saja menerima keputusan Keraton, meskipun tindakan tersebut sah secara legal formal. Gelombang perlawanan petani timbul seiring kesadaran mata pencaharian mereka terancam

---

<sup>9</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 10 (2013): 85–111.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 94.

<sup>11</sup> Muh Syaifullah, "Penambangan Pasir Besi Ancam Eksistensi Petani Kulonprogo," *Tempo*, last modified March 24, 2009, accessed January 14, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/166386/penambangan-pasir-besi-ancam-eksistensi-petani-kulonprogo>.

hilang dengan wacana proyek tambang pasir besi yang tercium sejak tahun 2003.<sup>12</sup> Petani menciptakan wadah perjuangan, yaitu PPLP-KP (Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo) untuk menguatkan solidaritas penolakan. Gelombang perlawanan tersebut membuahkan hasil dengan berhasil memberhentikan aktivitas pertambangan (untuk sementara). Stigmatisasi kerap muncul, yang menyebut petani Kulon Progo sebagai aktor anti-keistimewaan karena melawan kebijakan Keraton. Sampai saat ini petani masih berada di bawah ancaman kembalinya tambang, sebab Kontrak Karyanya berjalan 30 tahun.

Sejauh memahami konflik ekologi, beberapa peneliti menyebutnya sebagai konflik antara masyarakat lokal melawan korporasi global (Kartika, 2014; Candraningrum, 2019). Namun, apa yang terjadi di Kulon Progo merupakan konflik antara kelompok masyarakat (subordinat) melawan kelompok otoritas<sup>13</sup> (superordinat). Distribusi otoritas diidentifikasi sebagai penyebab konflik, di mana Keraton sebagai pemilik otoritas memiliki wewenang dalam mengatur kepemilikan tanah tanpa kehadiran rakyat. Dengan begitu, eksistensi petani tidak dianggap sebagai konstituen, tidak memiliki hak penuh atas tanahnya. Kepemilikan otoritas inilah yang dianggap sebagai sumber masalah ketidakmenentuan hidup petani, juga ruang hidup mereka. Petani menganggap bahwa keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta hanya dinikmati oleh rezim yang berkuasa, sedangkan rakyat tidak menikmati status keistimewaan tersebut.

---

<sup>12</sup> Jati, "Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo," 98.

<sup>13</sup> Menurut Ralf Dahrendorf, otoritas adalah bentuk posisi jabatan yang memiliki wewenang secara legal. Otoritas juga mampu mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan menghukum bagi yang tidak mematuhi. Lihat: Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, 283.

Berbagai konflik ekologi selalu menunjukkan perempuan aktif merespon, baik melalui aksi koersi atau aksi-aksi damai. Misalnya perempuan Mollo yang berada di garis terdepan penolakan, bahkan memimpin gerakan dengan mengembangkan berbagai kearifan lokal. Itu disebabkan adanya keterkaitan erat antara perempuan dengan alam, yang mana terbentuknya kesadaran perempuan tumbuh bersama alam.<sup>14</sup> Sedangkan aktivis perempuan di Amerika Serikat melakukan kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya polusi, batubara, dan isu sanitasi bagi tumbuhan dan manusia; kampanye tersebut dilakukan atas kepedulian mereka terhadap keluarga.<sup>15</sup> Ini memungkinkan juga bagi perempuan petani Kulon Progo melakukan penolakan dengan cara yang lokalistik. Sejumlah studi menyatakan, bahwa perempuan petani Kulon Progo turut serta dalam aksi penolakan demi mempertahankan wilayah pertanian.<sup>16</sup> Beberapa unjuk diri perempuan tersebut tidak semata-mata didapatkan begitu saja atau meneruskan apa yang telah dilakukan laki-laki, melainkan ada pengalaman panjang dan identifikasi diri terhadap lingkungan sekitar. Maka ia adalah subjek aktif dalam setiap aktivitas, baik menolak atau menerima realitas sosial demi memberi pengaruh terhadap masyarakat.

Menaruh perhatian pada struktur budaya Jawa dalam masyarakat petani Kulon Progo sangat perlu. Sebab, budaya Jawa cukup kental dengan patriarki dan

---

<sup>14</sup> Desintha D. Asriani, "Perempuan Mollo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Muntis," in *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim dan Memori Rahim, III* (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 125–139.

<sup>15</sup> Susan A. Mann, "Pioneers of U.S. Ecofeminism and Environmental Justice," *Feminist Formations* 23, no. 2 (August 20, 2011): 8, accessed May 29, 2020, <https://muse.jhu.edu/article/448629>.

<sup>16</sup> Miftahul Huda, "Petani Dalam Pusaran Modernisasi: Studi Kasus Petani Perempuan Karangsewu," *An Nisa'a* Vol. 14, no. 1 (2019): 107–118.



berdampak pada penundukan perempuan. Oleh karenanya, jawaban atas pertanyaan bagaimana cara perempuan petani masuk ke dalam konflik ekologi yang berwajah maskulin sekaligus berada di lingkaran budaya Jawa, adalah kebutuhan mendesak. Ketika itu terjawab, akan memberi peluang pengakuan bahwa perempuan bukan hanya mengikuti apa yang diputuskan laki-laki, tapi juga memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial yang diinginkan.

Keterkaitan perempuan dengan alam menjadi pijakan eskalasi kesadaran perempuan petani untuk masuk ke dalam konflik. Diketahui secara luas pemahaman tersebut dibawa oleh ekofeminisme, sebuah aliran feminisme yang muncul pada gelombang ketiga untuk merespon kehancuran alam dan kaitannya dengan penindasan perempuan. Aliran ini menekankan feminitas sebagai *common denominator* penjaga kelestarian lingkungan hidup<sup>17</sup> dan menyatu dengan sifat alam.<sup>18</sup> Namun konsep tersebut menjadi lonceng peringatan karena terlalu esensialis (mempertentangkan biologis) dan menganggap semua perempuan memiliki nasib yang sama, sehingga memperkecil kemungkinan untuk terintegrasi dengan laki-laki dalam satu gerakan.<sup>19</sup> Di lain sisi perempuan seperti berkewajiban dalam konservasi alam dan menerima begitu saja petuah laki-laki melalui budaya, sedangkan laki-laki bergerak sebagai penerima manfaat dari alam. Cara pandang tersebut jelas menafikan politik perempuan petani Kulon Progo di dalam konflik.

---

<sup>17</sup> Andris Noya, "Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Dalam Mengatasi Krisis Ekologis: Kajian Ekofeminisme," in *Ekofeminisme: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, Dan Budaya* (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), 120.

<sup>18</sup> Linda Alcoff, "Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory," *Signs* 13, no. 3 (1988): 407, accessed January 1, 2021, <https://www.jstor.org/stable/3174166>.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 406.

Ini juga menghalangi perempuan petani menjadi subjek aktif dalam konflik, karena mereka dianggap pasif dan wadah makna “perempuan” ditempatkan.

Alhasil, untuk melihat kontribusi perempuan petani tidak bisa hanya melalui aksi koersi dan forum-forum formal—meskipun ada, hanya sedikit dan tidak utuh. Pengungkapannya harus masuk ke dalam aktivitas riil perempuan petani dan menyelam ke dalam budaya Jawa. Dus, prinsip perempuan petani di dalam konflik memungkinkan untuk diungkap dan bentuk sumbangannya di dalam konflik dapat diketahui secara utuh dan radikal. Maka penelitian ini akan menitik-beratkan pada proses pembentukan identitas perempuan petani hingga kontribusinya di dalam konflik petani dan Keraton. Sekaligus, penelitian ini akan mengakrabkan antara ekofeminisme dengan budaya, yang selama ini telah mengalami pertentangan hebat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka beberapa pertanyaan dirumuskan untuk memudahkan fokus penelitian, antara lain:

1. Apa penyebab konflik antara perempuan petani Kulon Progo dan Keraton Yogyakarta?
2. Bagaimana perempuan petani menyusun identitas di dalam budaya Jawa untuk bersolidaritas melawan otoritas Keraton Yogyakarta?
3. Mengapa perempuan petani Kulon Progo menggunakan budaya Jawa untuk berkontribusi di dalam gerakan sosial?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara petani perempuan dan Keraton Yogyakarta di ekologi pasir besi Kulon Progo.
2. Untuk mengungkap proses pencarian identitas perempuan petani Kulon Progo untuk bersolidaritas melawan otoritas Keraton Yogyakarta.
3. Untuk membongkar budaya patriarki sekaligus mengarusutamakan subjektivitas perempuan di dalam gerakan sosial.

### **D. Kajian Pustaka**

Konflik adalah pertentangan atau ketegangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan saling berlawanan. Dalam hal ini, konflik memiliki fokus di ranah sosial-masyarakat, seperti pertentangan petani-perusahaan, masyarakat adat-pemerintahan, dan sejenisnya. Sebagian besar konflik sosial didominasi oleh kelompok yang berkuasa dengan berbagai alat yang melingkupi, seperti kebijakan, modal ekonomi, dan politik. Berbeda dengan kelompok subordinat yang jauh dari pusat kekuasaan, bahkan kelompok ini tidak memiliki relasi kuasa karena posisinya selalu dilemahkan oleh otoritas.

Tom Kramer (2015); Mirjam AF Ros-Tonen dan Mercy Derkyi (2018); Mustain (2017); Suliadi (2015); dan Ardiana Dewi Sesanti (2016) menunjukkan konflik yang terjadi antara otoritas dan masyarakat (khususnya petani) selalu memperebutkan hak atas tanah. Setiap tanah yang diperebutkan mengandung

manfaat bagi setiap kelompok konflik. Maka bagi otoritas, tanah mengandung sumber daya yang berpotensi memberi nilai ekonomi (kapital), sedangkan bagi petani, tanah merupakan ruang hidup dan sumber ekonomi subsisten. Karena masing-masing kepentingan berlawanan arah, konflik terjadi secara tiba-tiba bahkan radikal. Di dalam arena konflik, yaitu tanah pertanian dan adat, otoritas selalu menggunakan instrumen hukum untuk melegitimasi kekuasaannya atas tanah.

Kramer menyebutkan dampak dari pemberlakuan hukum positif (ia menyebut, hukum tulis) atas kepemilikan tanah menjadikan masyarakat adat dianggap sebagai penghuni liar (*squatters*); karena secara hukum, tanah yang mereka tempati menjadi “milik” otoritas.<sup>20</sup> Kasus Mesuji, misalnya, masyarakat yang datang ke Lampung hasil kebijakan transmigrasi Orde Baru mendapat tekanan dari PT. Silvi yang menguasai tanah 22.666 ha sejak area kerjanya telah diperluas pada tahun 1997. Perlawanan terhadap PT. Silvi memang ada, tapi dengan kepemilikan modal, izin beroperasi dipulihkan kembali pada tahun 2004. Akibatnya masyarakat yang tinggal di dalam wilayah kerja PT. Silvi menjadi “penghuni liar”.<sup>21</sup>

Kelompok subordinat (*squatters*) bukanlah masyarakat yang menyerah begitu saja terhadap kebijakan otoritas yang opresif. Oleh karenanya, otoritas menurunkan sanksi kepada kelompok subordinat untuk mempertahankan *status*

---

<sup>20</sup> Tom Kramer, “Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar,” *Social Research: An International Quarterly* 82, no. 2 (July 24, 2015): 363–365, accessed May 5, 2020, <https://muse.jhu.edu/article/587495>.

<sup>21</sup> IPAC, *Mesuji: Anatomy of an Indonesian Land Conflict* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2013), 8, accessed May 5, 2020, [https://www.jstor.org/stable/resrep07804.1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/resrep07804.1#metadata_info_tab_contents).

*quo*, dengan dalih ketidaktaatan. Otoritas dengan modal ekonominya juga berpotensi mengatur kelompok subordinat dengan kekerasan atau dengan membuat konflik horizontal: antar-masyarakat.<sup>22</sup> Namun, jalan mitigasi konflik mungkin dilakukan antara otoritas dan subordinat dengan dimediasi oleh pihak ketiga. Meskipun memilih jalan damai, tetap saja negosiasi berjalan atas dasar hukum positif, di mana itu adalah titik lemah masyarakat adat (subordinat).<sup>23</sup> Tujuan dari penggunaan hukum positif adalah untuk mempermudah investor menanamkan saham di dalam negeri, kemudian yang terjadi adalah ekstraksi alam (Kramer, 2015; Mustain, 2017; Rebecca Elmhirst dkk., 2016). Hukum positif cukup efektif untuk melemahkan masyarakat adat, karena pada umumnya masyarakat adat menggunakan hukum tutur (tidak tertulis), sedangkan penyusunan hukum positif tidak melibatkan masyarakat hilir (paling terdampak).

Namun memungkinkan juga adanya sebuah kerja sama pragmatis antara masyarakat dengan pengusaha. Masyarakat mendapat kompensasi atas sumber daya alam (hutan dan pohon) sedangkan pengusaha mendapatkan sumber daya yang telah dibayar. Pun juga ketika mata pencaharian masyarakat terdampak oleh perusahaan, mereka bisa beralih profesi menjadi buruh di perusahaan yang telah “membeli” lahan mereka.<sup>24</sup>

Elmist dkk. menegaskan, bahwa konflik perebutan ruang (pertanian dan tanah adat) merupakan isu feminis, maka harus menyertakan perspektif gender

---

<sup>22</sup> Ibid., 11.

<sup>23</sup> Mirjam A. F. Ros-Tonen and Mercy Derkyi, “Conflict or Cooperation? Social Capital as a Power Resource and Conflict Mitigation Strategy in Timber Operations in Ghana’s off-Reserve Forest Areas,” *Ecology and Society* 23, no. 3 (2018): 9, accessed May 5, 2020, <https://www.jstor.org/stable/26799162>.

<sup>24</sup> Ibid.

dalam melihat konflik. Menurutnya, menganggap hasil negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan seperti itu hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin, langkahnya kurang radikal. Perempuan pada akhirnya paling terdampak oleh hilangnya sumber daya. Mereka yang biasa bertani tidak bisa mengakses mode kerja yang mengandalkan kekuatan fisik, seperti pertambangan; atau terkontaminasinya air oleh limbah pabrik juga menjadi masalah perempuan. Keterikatan perempuan dengan alam (*caring, nurturing*) memicu mereka untuk memikirkan nasib keluarga selangkah lebih maju dari laki-laki; misalnya memikirkan di mana bisa mendapatkan air bersih untuk minum dan masak.<sup>25</sup>

Kramer, Ros-Tonen dan Derkyi, dan Mustain menunjukkan bahwa pembangunan adalah instrumen konflik antara superordinat dan subordinat. Konfliknya seputar perebutan lahan dengan tujuan mengejar nilai ekonomi ekstraksinya. Itu merupakan cara pandang dan standarisasi kapitalis terhadap ciri negara maju, yaitu dengan melakukan pembangunan. Namun dalih menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat lokal. Watak pembangunan memang sengaja tidak mengarah ke sana; siapa yang merencanakan, mereka yang diuntungkan.

Negara dengan perangkat hegemoninya menjelma institusi yang dibenarkan merampas tanah warganya. Di pihak lain, ada petani sebagai kelompok rasional—yang selalu menjadi korban perampasan—mampu mengidentifikasi setiap ancaman yang muncul dan mempersiapkan diri untuk bertahan dari potensi kerugian.

---

<sup>25</sup> Rebecca Elmhirst, Mia Siscawati, and Carol J. Pierce Colfer, “Revisiting Gender and Forestry in Long Segar, East Kalimantan, Indonesia: Oil Palm and Divided Aspiration,” in *Gender and Forest: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues*, ed. Carol J. Pierce Colfer, Bimbika Sijapati Basnett, and Marlene Elias (New York: Routledge, 2016), 310.

*Reclaiming* adalah gerakan yang biasa dilakukan petani untuk merebut kembali tanah mereka yang dirampas oleh otoritas. Di mata otoritas, gerakan tersebut dianggap melawan hukum dengan dalih tanah sudah memiliki sertifikat hak milik. Namun petani akan terus berusaha merebut tanahnya, karena akumulasi kekecewaan dan merasa tidak diurus oleh negara lebih besar dari pada janji kesejahteraan di masa depan.<sup>26</sup>

Gerakan perlawanan petani juga berpotensi memunculkan pilihan moral mereka. Maksud pilihan moral di sini adalah, pertimbangan petani terhadap kehidupan keluarga dengan menghitung untung-rugi dari mempertahankan tanah mereka. Pilihan tersebut muncul lantaran petani memiliki pilihan rasional untuk hidup di tengah sistem kapitalisme yang tidak menentu. Hegemoni negara melalui pembangunan menciptakan resiko-resiko yang tidak terprediksi oleh petani, yang kemudian memaksa petani untuk memilih menyerahkan tanahnya dengan mendapat ganti rugi oleh negara atau diambil alih oleh negara secara paksa tanpa ganti rugi. Pada akhirnya, negara mendesak petani hingga mereka hanya memiliki satu pilihan: menyerahkan lahannya kepada negara dan mendapat kompensasi sekaligus langkah awal meleburkan diri ke dalam sistem kapitalisme—dari pada harus kehilangan tanah tanpa mendapatkan apa-apa.<sup>27</sup>

Itu merupakan pilihan diplomatis, sebab tidak ada jaminan untuk kehidupan jangka panjang, baik bagi petani atau pun alam. Namun hal tersebut sekaligus menciptakan dilema, di mana petani juga berusaha untuk mengurangi kesengsaraan

---

<sup>26</sup> Mustain, *Petani vs. Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Nedia, 2017), 364–366.

<sup>27</sup> Suliadi, “Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Karangwuni Kulon Progo,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 9, no. 2 (2015): 79–102.



dan ketidakpastian hidup, dengan menerima kompensasi dan bekerja di sektor industri. Sisi paradoksnya adalah, sejak petani menyerahkan tanahnya kepada perusahaan, sebenarnya status petani sudah ditanggalkan (kecuali mereka yang memiliki petak lahan lebih dari satu). Dengan kata lain, mereka telah terhegemoni oleh negara dan masuk ke dalam sistem kapitalis dengan ketidakpastian pekerjaan di masa depan. Ini menjadi kelemahan konsep ekonomi moral petani.

Sektor perizinan menjadi pertimbangan masyarakat—baik petani, warga lokal, atau masyarakat adat—dalam wilayah konflik. Beberapa aktor otoritas hierarkis masuk dalam dinamika perizinan pembangunan, seperti Walikota dan perangkat perizinannya<sup>28</sup>—yaitu dinas perizinan—investor, serta keterlibatan lembaga non pemerintahan. Sebab kehadiran mereka dipahami masyarakat sebagai kesengajaan untuk meminggirkan masyarakat di sekitar wilayah target pembangunan. Perebutan ruang yang melibatkan pengusaha dan aktor negara telah membuktikan dampak lingkungan bagi masyarakat, sekaligus mewarnai problem pembangunan. Hal tersebut sekaligus memicu kebingungan masyarakat untuk melawan, sebab yang akan dihadapinya adalah persekutuan besar dan “legal”. Keterlibatan pemerintah juga menjadi momok yang sulit ditumbangkan meski masyarakat mampu mendeteksi kerusakan ekologi yang akan ditimbulkannya nanti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hadirnya lembaga perizinan adalah untuk menciptakan teritorialisasi wilayah adat, hutan, dan tanah rakyat. Rakyat yang wilayahnya masuk hutan negara berpotensi menjalani konflik secara terus-menerus. Sebab, pemerintah bisa leluasa memberi lisensi kepada korporasi untuk menduduki tanah negara, sedangkan di sisi lain rakyat yang menduduki dan mendapatkan manfaat dari wilayah yang diberi lisensi terus melakukan penolakan. Maka terciptalah konflik struktural. Selengkapnya baca: Noer Fauzi Rachman, *Panggilan Tanah Air*, Cet. ke-3. (Yogyakarta: INSISTPress, 2017), 34–35.

<sup>29</sup> Ardiana Dewi Sesanti, *Jogja-Ku[Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa Dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta* (Yogyakarta: STPN Press, 2016).

Kramer, Ros-Tonen dan Derkyi, Mustain, dan Sesanti telah menerangi wajah konflik beserta aktornya. Setiap konflik yang terjadi menghasilkan kelompok superordinat dan subordinat, yang keduanya memiliki kepentingan berlawanan. Fenomena konflik selalu menguntungkan superordinat karena ia memiliki wewenang untuk membuat kebijakan—kelompok ini disebut juga sebagai otoritas. Namun tidak bisa melihat konflik berhenti sampai pada hal-hal normatif saja, karena potensi mengungkap kelompok yang terdiskriminasi dan teropresi sangat rendah. Maka harus meletakkan kepemilikan otoritas sebagai sumber konflik dan instrumen memuluskan kepentingan, sebab normativitas sering digunakan otoritas untuk menjaga *status quo*.

Dalam konteks konflik petani dan Keraton Yogyakarta perlu memasukkan aspek budaya. Sebab otoritas mengonversi hal-hal kultural menjadi legal, dan menjadikannya pusat kekuatan untuk melemahkan posisi masyarakat petani, misalnya mendaku tanah dengan legitimasi kultural. Maka posisi petani berhadapan langsung dengan Keraton, sedangkan tambang adalah wajah antroposentrisme Keraton (bukan inti konflik). Dengan demikian hal yang belum diungkap adalah bagaimana otoritas menggandeng budaya untuk memperlemah posisi—khususnya perempuan—petani Kulon Progo.

Perlu ditekankan, menganggap semua kelompok yang tersubordinasi memiliki nasib yang sama adalah hal yang naif. Struktur budaya, pengalaman, identitas, dan tubuh biologis adalah aspek yang memengaruhi level ketertindasan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color," *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–1299, accessed December 27, 2019, <https://www.jstor.org/stable/1229039>.



Keadaan tersebut lebih kentara jika aktor pembangunan tidak mengarusutamakan gender dalam kebijakan pembangunannya. Ini mengakibatkan relasi gender dan dunia sosial perempuan mengalami perubahan ke arah negatif, seiring rusak dan dirampasnya sumber daya alam.<sup>31</sup> Selanjutnya perempuan harus menyesuaikan diri hidup di dalam sistem kapitalisme. Pelibatan perspektif gender dalam konflik akan menghasilkan cara pandang yang lebih kritis. Gender juga sebagai jembatan untuk memahami kelompok yang paling tertindas dan tertutup suaranya oleh struktur.

Langkah awal untuk mengetahui suara kelompok tertindas adalah tidak mengabaikan struktur ekonomi dan alam. Berkaitan dengan status Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga serta pertanian sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi (31,86%, 2017),<sup>32</sup> membuat petani harus berhadapan langsung dengan neoliberal<sup>33</sup> (sekaligus negara sendiri). Jika melihat Kulon Progo, di sana telah berderet para petani serta sumber daya pasir besi yang diproyeksikan untuk menyaingi biji besi dari Brasil.<sup>34</sup> Tentu mengancam ekonomi mandiri perempuan petani setempat karena tambang mensyaratkan pembebasan (penggusuran) lahan pertanian.<sup>35</sup> Maka gender menjadi kaca mata untuk melihat

---

<sup>31</sup> Elmhirst, Siscawati, and Colfer, "Revisiting Gender and Forestry in Long Segar, East Kalimantan, Indonesia: Oil Palm and Divided Aspiration," 309–311.

<sup>32</sup> Okezone, "31,86% Penduduk Kerja Indonesia Ada di Sektor Pertanian: Okezone Economy," <https://economy.okezone.com/>, last modified May 5, 2017, accessed January 14, 2021, <https://economy.okezone.com/read/2017/05/05/320/1683895/31-86-penduduk-kerja-indonesia-ada-di-sektor-pertanian>.

<sup>33</sup> Awail Rizky and Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia* (Jakarta: E Publishing Company, 2008), 22.

<sup>34</sup> Kurniatul Hidayah, "Pasir Besi Kulonprogo Diuji Di China," *TribunJogja*, last modified September 29, 2020, accessed January 14, 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2020/09/29/pasir-besi-kulonprogo-diuji-di-china>.

<sup>35</sup> Miftahul Huda and Alfa Chusna, "Empowering Female Farmers Against Mining Capitalism," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (April 21, 2020): 127–146, accessed September 15, 2020, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/5311>.

level ketertindasan dan titik keberangkatan perempuan petani dalam merespon masalah sosial.

Beberapa dampak buruk pertambangan adalah kehilangan ruang hidup, relasi sosial, keterbatasan akses sumber daya, dan kerusakan alam. Dari sekian dampak tersebut, perempuan pedesaan adalah kelompok paling dirugikan karena dekatnya aktivitas mereka dengan ruang yang dijadikan target pembangunan. Kompleksitas sistem reproduksi menjadi ancaman serius bagi perempuan, karena tambang juga mencemari sumber kebutuhan wilayah domestik—seperti air, pangan, tanah, dan udara—di mana perempuan banyak beraktivitas di sana.<sup>36</sup> Dus, perempuan bersentuhan langsung dengan sumber resiko penyakit serta pilihan untuk menjauhinya juga semakin sempit karena ada struktur budaya yang mengawasi.

Titiek Kartika (2014), Ira D. Mangililo (2015), dan Dewi Candraningrum (2019) telah memasukkan perempuan dan alam sebagai entitas yang sama-sama tertindas. Kartika dan Mangalilo menggali identitas perempuan dan bagaimana mereka, sebagai kelompok terbungkam, menyuarakan pengalaman ketertindasan. Hasilnya, perempuan diketahui membangun identitas perlawanannya berdasarkan *social experience* untuk kepentingan bertahan hidup (*survive*). Sedangkan Candraningrum menyebut spiritualitas adalah basis resistensi perempuan dalam melawan tambang, perempuan memanasikan tubuhnya sebagai alam dan terkoneksi dengannya.

---

<sup>36</sup> Tommy Apriando, “Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang Pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Right),” *Jurnal Perempuan* 20, no. 3, 86 (2015): 48–52.

Ada argumen cukup mendasar dan masuk dalam perdebatan ekofeminisme, yaitu penjaga dan yang terkoneksi dengan alam bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki, keduanya bersolidaritas untuk menjaga alam.<sup>37</sup> Ada nilai-nilai lokal yang mendorong sebuah gerakan, baik laki-laki atau perempuan, yang terintegrasi dengan alam, sekaligus meminggirkan cara pandang esensialis yang terlalu naif terhadap ragam identitas manusia. *Role model* sejarah menjadi salah satu nilai lokal untuk mendorong perempuan menjadi pemimpin gerakan (emansipasi).<sup>38</sup> Di sisi lain, alam menjadi ruang aman bagi perempuan untuk merekonstruksi realitas dan solidaritas.<sup>39</sup> Ini menegaskan bahwa aspek identitas melingkupi dan mendorong sebuah gerakan. Alam bukan dipahami sebagai cermin perempuan, menandakan ia memiliki sifat alam yang terberi dan tidak tertolak, melainkan ada kesengajaan perempuan mengonstruksi identitasnya untuk terhubung dengan alam. Dengan demikian, proses pencarian identitas adalah langkah awal terbentuknya sebuah lokalitas gerakan. Kesamaan identitas membuahkan solidaritas dan kepekaan mengenali sisi eksternal yang mengancam eksistensi mereka.

Identitas perempuan dalam budaya adalah komponen penting untuk berkontribusi dalam perlawanan menolak tambang. Kartika menemukan perempuan didukung oleh nilai-nilai lokal yang egaliter dan mendukung perlindungan hutan, tentu ini proses perempuan dalam menentukan pilihan, bukan

---

<sup>37</sup> Dewi Candraningrum, "The Spiritual Politics of the Kendeng Mountains Versus the Global Cement Industry," in *After the Death of Nature: Carolyn Mercant and the Future of Human Nature Relation*, ed. Kenneth Worthy, Elizabeth Allison, and Whitney A. Bauman (New York: Routledge, 2019), 221.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 224.

<sup>39</sup> Ira D. Mangililo, "Bumi Sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo Melawan Tambang Mangan," in *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim*, ed. Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, Seri III (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 182–183.

ahistoris. Unsur budaya adalah bagian penting dalam penyusunan identitas sekaligus titik keberangkatan gerakan lokal. Misalnya, perempuan digambarkan sebagai pemegang kunci ruang domestik dan memiliki sifat keras, maka perempuan akan mengidentifikasi ancaman yang mendekati wilayahnya. Kartika menyebut tindakan perempuan dalam menolak tambang adalah aksi politis, meskipun mereka tidak memiliki cukup ruang bicara di ruang publik. Namun, ruang-ruang koersif (demonstrasi, tindakan langsung) menjadi ruang alternatif perempuan lokal dalam menampilkan sikap politiknya, yang oleh budaya dianggap tidak representatif.<sup>40</sup>

Kartika dan Mangililo menunjukkan keberhasilan perempuan dalam menghentikan pertambangan dengan mengonversi struktur budaya menjadi ruang yang politis. Sedangkan Candraningrum menunjukkan kapasitas perempuan sebagai pemimpin gerakan sosial sekaligus mempertahankan identitas mereka yang erat dengan alam. Ketiganya menunjukkan kesamaan untuk tetap menggunakan identitas dan ruang budaya sebagai titik berangkat perlawanan. Kemudian alam sebagai target yang harus diselamatkan oleh perempuan, alih-alih sebagai arena politik belaka. Dengan begitu, menyelamatkan alam adalah menyelamatkan masyarakat—dalam pandangan politik perempuan lokal.

Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa memang perempuan melakukan perlawanan terhadap tambang, dan identitas sebagai penguat solidaritas; tapi pola pembentukan identitas itu tidak generik, melainkan lokalistik. Dengan adanya pengaruh otoritas Keraton Yogyakarta yang menggunakan budaya dalam

---

<sup>40</sup> Titi Kartika, *Perempuan Lokal VS Tambang Pasir Besi Global* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 216–221.

menjalankan kekuasaannya, maka perempuan petani berada di dalam lapisan subordinasi: di bawah watak otoritas yang antroposentris dan (sebagian) budaya Jawa yang patriarkis. Tidak seperti studi Kartika yang menyatakan suara perempuan tidak bisa menjangkau ruang publik dan hanya bisa menggunakan tindakan koersif (ini bisa terpeleset mengadopsi sifat maskulin) untuk mencapainya, justru perempuan petani Kulon Progo berusaha mengintervensi konflik dan ruang publik melalui ruang domestik dan budaya Jawa. Artinya, perempuan petani Kulon Progo telah membentuk pola melawan otoritas Keraton Yogyakarta. Maka inilah yang akan diungkap, yaitu proses perempuan petani Kulon Progo membentuk identitas di dalam budaya Jawa dan melawan balik otoritas Keraton Yogyakarta bersama budaya Jawa yang ia pancarkan.

Perlu kiranya meninjau beberapa studi yang melibatkan perempuan petani dan Otoritas Keraton Yogyakarta dalam satu arena. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perempuan petani diakui sebagai subjek aktif yang melakukan perlawanan dan mengonversi budaya Jawa untuk melawan otoritas. Maka dua studi, yaitu Argoposo C. Nugroho (2015) dan Wasisto Raharjo Jati (2013) cukup representatif menggambarkan kedalaman studi perempuan di dalam konflik pasir besi.

Dalam studi Nugroho, perempuan petani memiliki empat modal untuk terlibat dalam konflik. Beberapa modal itu direpresentasikan oleh perempuan, antara lain bertani, spiritual, propaganda, pendidikan.<sup>41</sup> Perempuan

---

<sup>41</sup> Argoposo C. Nugroho, "Bertani Di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi," in *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, Dan Memori Rahim*, ed. Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, III (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), 107–116.



mengedepankan pengalaman sebagai esensialisme reflektif bahwa alam bukan entitas pasif dan bebas dibentuk. Sebaliknya, alam akan bertindak defensif dan memungkinkan untuk menyumbang resistensi ketika ia dieksploitasi tanpa henti. Refleksi inilah yang diinternalisasikan pada diri perempuan sebagai modal resistensi. Mereka menyertakan esensialisme reflektif saat melakukan aktivitas bertani, mendidik, propaganda, dan spiritual. Keempat modal sosial perempuan tersebut bertujuan untuk menciptakan kontinuitas perlawanan terhadap tambang yang memiliki umur sewa 30 tahun, sehingga anak-cucu mereka berpotensi menjadi korban.

Jati menemukan kompleksitas konflik yang terjadi di Kulon Progo. Berbeda dengan Nugroho, Jati menambahkan Keraton sebagai rezim predatoris ke dalam kelompok konflik yang berkongsi dengan korporasi tambang melawan petani. Hasilnya, Kraton sebagai rezim tata kelola sumber daya memiliki otoritas dalam mengatur ruang di suatu daerah tanpa melibatkan masyarakat hilir. Sistem patrimonial dengan logika pembangunanisme menjadi sumber utama ketertindasan alam serta masyarakat petani yang ada di dalamnya. Kondisi petani yang teropresi oleh rezim predatoris, yang mengatasmakan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah, menjadikannya awal mula gelombang resistensi.<sup>42</sup>

Ada perbedaan orientasi antara petani dan Keraton. Petani berorientasi mempertahankan area pertanian di atas pasir besi yang sebelumnya dinyatakan Keraton sebagai wilayah tandus. Di lain sisi, Kraton memiliki orientasi

---

<sup>42</sup> Jati, "Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo," 94.

pembangunan dan menjadikan wilayah pantai pasir besi yang berstatus penghasil pendapatan daerah paling rendah se-Jawa menjadi daerah eskavasi pertambangan. Menurut Jati,<sup>43</sup> penemuan kandungan alam di Kulon Progo yang selama ini tersembunyi memancing investor dan Kraton untuk memperkaya diri. Otomatis jika tambang beroperasi, maka akan merusak ekologi pasir besi; begitu juga petani yang ada di dalam ekosistem, karena ekonomi petani bergantung pada pasir besi. Konflik sumber daya alam yang terjadi dalam bentuk lokal itu, oleh Jati,<sup>44</sup> disebut memunculkan wajah baru, yaitu neo-kapitalisme semu dan patrimonialisme bisnis.

Nugroho dan Jati saling melengkapi dalam studinya, perempuan petani merefleksikan diri dengan alam untuk melawan rezim predatoris, yaitu Keraton Yogyakarta. Namun Nugroho masih menggunakan cara pandang esensialis, di mana perempuan (dianggap) tidak bisa menyentuh budaya dan menghanyutkan diri pada alam—meski ada sifat reflektif. Sedangkan studi Jati membuka jalan perlawanan perempuan terhubung sampai ke otoritas Keraton, bukan sekadar ke tambang. Kendatipun sudah representatif, tapi kedua studi belum menunjukkan intervensi perempuan melalui ruang budaya dan menempatkan Keraton sebagai otoritas yang menggunakan budaya untuk memperlemah masyarakat petani—khususnya perempuan. Alhasil, perempuan belum dilihat sebagai subjek dalam ruang budaya yang sering diasosiasikan sebagai maskulin. Sedangkan di saat bersamaan, perempuan bergerak di dalam budaya Jawa yang dipancarkan oleh Keraton sekaligus diresepsi oleh masyarakat.

---

<sup>43</sup> Ibid., 99.

<sup>44</sup> Ibid., 109.



Berdasarkan kajian yang terdahulu, maka penelitian ini, *pertama*, berusaha meletakkan konflik yang terjadi di Kulon Progo bukan petani menghadapi tambang, tapi otoritas Keraton Yogyakarta, di mana penelitian-penelitian sebelumnya mengabaikan aspek otoritas sebagai kreator konflik. Oleh karenanya, Keraton mampu menjadikan dirinya sebagai narasumber resmi budaya Jawa. Maka, *kedua*, penelitian ini akan mengungkap cara perempuan petani mengonversi budaya Jawa menjadi alat perlawanan dan penguat solidaritas; sekaligus, *ketiga*, cara perempuan petani mempertahankan ekologi pasir besi, yang mana ini menggugurkan kecenderungan esensialis yang menempatkan perempuan sebagai cerminan alam.

#### **E. Kerangka Teoretis**

##### **1. Konflik dan Otoritas**

Properti (hak milik) menjadi simbol kekuasaan yang tumbuh kuat dan efektif. Hal tersebut yang mengawali tatanan sosial baru, yaitu adanya kelas pemilik modal dan kelas pekerja, si kaya dan si miskin, dominan dan subordinat.<sup>45</sup> Analisa Marx mengatakan konsep tersebut menjadi cikal-bakal sistem kapitalisme, yang syarat dengan “yang menguasai” dan “yang dikuasai”.<sup>46</sup> Kepemilikan properti juga disinyalir Marx sebagai biang konflik, dan memberlakukannya secara generik. Namun kompleksitas zaman dan ragam kepentingan masyarakat, menjadikan teori Marx sulit untuk menjelaskan fenomena sosial yang beragam karena ia

---

<sup>45</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959), 5.

<sup>46</sup> Gregor MacLennan, “Maintaining Marx,” in *Handbook of Social Theory*, ed. George Ritzer and Barry Smart (London: SAGE Publications, 2001), 46.

menekankan perubahan masyarakat secara fundamental dan perjuangan berat. Maka Ralf Dahrendorf menghadirkan teori konflik yang mendalam dengan mempertimbangkan variabel: bagaimana mereka digerakkan, dimensi apa saja yang dirampas dari masyarakat, dan relasi antara pemimpin dan pengikut.<sup>47</sup>

Teori konflik Dahrendorf memberi jalan untuk menjernihkan siapa yang berkonflik di atas pasir besi Kulon Progo. Dahrendorf<sup>48</sup> secara khusus menolak pendapat Talcott Parsons tentang ekuilibrium masyarakat yang terus bergerak, stabil, terintegrasi, koordinasi fungsional, dan konsensus. Atas penolakannya, ia menyatakan bahwa setiap masyarakat menyumbang perubahan, konflik, disintegrasi, dan koersi.<sup>49</sup> Menurutnya, kompleksitas masyarakat dan berlakunya hierarki dalam kehidupan sosial saat ini tidak bisa dijelaskan dengan teori integrasi. Dalam hal ini, perlawanan yang dilakukan petani Kulon Progo bukan menandakan mereka kelompok yang tidak produktif atau tidak terintegrasi dengan masyarakat, melainkan mereka mendapat gangguan dari sistem yang ada—yaitu, yang disebut Jati sebagai, rezim predator lokal—alih-alih pemeliharaan. Tindakan yang dilakukan petani adalah usaha untuk menciptakan perubahan sosial, yang mana tidak mungkin tercapai jika hanya “mentaati” aturan Keraton.<sup>50</sup> Sebab, kepentingan antara petani dan Keraton berada di kutub yang berbeda.

Selanjutnya adalah melihat Keraton sebagai kreator konflik, yang akan menerangkan relasi antara petani Kulon Progo dengan Keraton Yogyakarta. Oleh

---

<sup>47</sup> Mark Abrahamson, “Functional, Conflict and Neofunctional Theories,” in *Handbook of Social Theory*, ed. George Ritzer and Barry Smart (London: SAGE Publications, 2001), 146.

<sup>48</sup> Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, 161.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 162.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 161–162.

sebab itu harus jeli membedakan antara kekuasaan (*power*) dan otoritas (*authority*), sebab keduanya akan menjadi kaca pembesar yang menunjukkan peran Keraton sebagai opresor. *Pertama*, kuasa yang dimaksud Dahrendorf bekerja secara esensial, terikat dengan personal individu. Ini menjelaskan bahwa HB X sebagai individu mampu mendistribusikan kuasa untuk memengaruhi rakyat tentang tatanan masyarakat yang ideal, karena bekal status sosialnya.<sup>51</sup> Meskipun begitu HB X tidak bisa mengontrol rakyatnya secara penuh, karena pengakuan kultural tidak berfungsi di tatanan dunia modern. Maka, *kedua*, Dahrendorf menyebutkan “otoritas” untuk menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengontrol orang lain secara sah. Otoritas adalah sesuatu yang melekat pada posisi atau peran, dalam hal ini HB X menjalankan peran pemerintahan Keraton Yogyakarta—ia melekat dengan institusi, sehingga mampu memaksakan gagasannya kepada masyarakat. Otoritas juga disebut sebagai kekuasaan yang terlegitimasi, karena ia mampu mendominasi dan menundukkan secara sah dalam berrelasi. Kepemilikan otoritas tersebut menjelaskan bahwa awal kehadiran tambang adalah berkat distribusi otoritas oleh Keraton, bukan kekuasaan HB X, apalagi atas kehendak korporasi sendiri.<sup>52</sup> Ini juga mengandung hasrat Keraton untuk mengikuti arah pembangunan Barat, yang sebenarnya hanya menghasilkan hubungan non-egaliter dan eksploitatif dengan negara Dunia Pertama.<sup>53</sup>

Distribusi otoritas menjadi inti konflik, sebab ia berusaha mengintegrasikan masyarakat melalui paksaan dengan menciptakan institusi-institusi di dalam

---

<sup>51</sup> Ibid., 165–166.

<sup>52</sup> Ibid., 166.

<sup>53</sup> Maria Mies and Vandana Shiva, *Ecofeminism*, 2nd edition. (New York: Zed Books, 2014), 58–59.

masyarakat yang muaranya adalah mendukung kehendak otoritas tertinggi, alih-alih menjadikan masyarakat sebagai subjek yang mampu berkonsensus dan bekerja sama. Hal tersebut menjelaskan bahwa Keraton sebagai otoritas tertinggi memanfaatkan lembaga pemerintahan di bawahnya untuk mendukung perizinan tambang pasir besi tanpa berdialog dengan petani. Dus, Keraton mampu menyeragamkan suara hingga ke tingkat desa bahkan RT, untuk mengintegrasikan petani dalam program yang telah dicanangkan, tentu dilegitimasi dengan aturan yang juga telah dibuat. Tapi justru langkah tersebut tidak menjadikan masyarakat terintegrasi, melainkan menyulut api konflik, dan pendistribusian otoritas hingga institusi terendah menjadikan watak dominatif otoritas semakin dirasakan masyarakat, alih-alih merasa diberdayakan. Alhasil, mengacu Dahrendorf, terciptalah kelompok yang saling berkonflik, yaitu Keraton sebagai kelompok superordinat dan petani sebagai kelompok subordinat, yang keduanya memiliki kepentingan yang saling berlawanan.<sup>54</sup>

Teori konflik Dahrendorf pada akhirnya berguna untuk menjelaskan bahwa yang berkonfrontasi di atas pasir besi adalah petani dan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, sumbangan Dahrendorf akan digunakan untuk menganalisa distribusi otoritas Keraton Yogyakarta di atas pasir besi sekaligus menelisik watak Keraton melalui kebijakannya. Kemudian di pihak lain ada petani yang tersubordinasi dan terus berusaha menyumbang perubahan sosial melalui konflik.

---

<sup>54</sup> Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, 180.

## 2. Politik Identitas Perempuan dan Ekofeminisme

Minimnya narasi perempuan di dalam konflik bukan disebabkan ketidakhadiran mereka atau ketidakmampuan bersuara, melainkan akses mereka ke ruang publik dibatasi. Penyebab terbatasnya akses perempuan adalah ketidakseimbangan budaya, politik, dan sosial-ekonomi yang berdampak juga terhadap alam.<sup>55</sup> Berkaitan juga dengan konflik petani dan Keraton, bukan semata-mata menjadikan pasir besi sebagai arena konflik, melainkan ia sebagai subjek hidup yang juga dirugikan dengan kehadiran tambang. Maka ekofeminisme akan menjembatani pemahaman awal ini, bahwa keduanya (perempuan dan alam) sama-sama teropresi di dalam konflik.<sup>56</sup> Karen J. Warren menyarankan untuk mengungkap bagaimana pengetahuan perempuan bersama alam melalui pengalaman sehari-hari.<sup>57</sup>

Namun persoalan mendasarnya, perempuan cenderung dianggap menerima begitu saja konsepsi gender dan tercipta memiliki sifat alam. Konsepsi ekofeminisme cenderung terjebak di wilayah tersebut, menganggap nasib semua perempuan sama, generik, dan mengabaikan subjektivitasnya. Oleh sebab itu, teori politik identitas Catriona Sandilands<sup>58</sup> akan digunakan untuk menjelaskan subjektivitas perempuan petani dan mengakui isu politik yang ia bawa. Ini juga

---

<sup>55</sup> Miriam Kammer, "Breaking the Bounds of Domesticity: Ecofeminism and Nature Space in Love's Labour's Lost," *Shakespeare Bulletin*, 2018, 468, accessed March 27, 2020, <https://muse.jhu.edu/article/707370>.

<sup>56</sup> D. Rocheleau, B. Thomas-Slayter, and E. Wangari, *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences* (London: Routledge, 1996), 3–4.

<sup>57</sup> Karen J. Warren, "Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical Perspective," in *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*, ed. Karen J. Warren (United States of America: Indiana University Press, 1997), 4–6.

<sup>58</sup> Catriona Sandilands, *The Good-Natured Feminist: Ecofeminist and the Quest for Democracy* (London: University of Minnesota Press, 1999).



akan menjelaskan bahwa perempuan petani memberi perlawanan terhadap otoritas Keraton Yogyakarta.

Sandilands memperingatkan untuk tidak terburu-buru mengaitkan budaya dengan laki-laki dan alam dengan perempuan, karena itu bisa mengafirmasi dominasi gender sebagai produk alamiah. Maka perlu mengakui perempuan dengan berbagai pengalamannya di ruang domestik dan bersama alam; kemudian secara jernih melihat perempuan membentuk gerakan politik identitas untuk menyuarakan pengalamannya. Perempuan dan alam mengalami pembungkaman, pendevaluasian, dan dikucilkan dari kehidupan, isu inilah yang akan diungkap ke publik. Sandilans sudah memberi perhatian bahwa pengungkapannya cukup eksklusif dan syarat dengan subjektivitas perempuan, karena memang bermaksud untuk menjadikannya sangat politis.<sup>59</sup> Ini seirama dengan perempuan petani Kulon Progo yang tidak diam saja di dalam konflik, melainkan terus bergerak mencari celah di dalam budaya Jawa. Dengan demikian, perempuan berada pada arus tradisi politik gerakan sosial, dan mereka bisa menyampaikan keinginan kelompok.

Politik identitas mendorong perempuan yang semula objek menjadi subjek pembawa perubahan—Sandilans menyebutnya revolusi.<sup>60</sup> Ini menjadi ruang bagi petani perempuan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami sebelum dan selama berkonflik dengan Keraton, di mana ini tidak mungkin dirasakan oleh laki-laki—bahkan perempuan—yang berada di luar identitas. Dan identitas tersebut merupakan pusat untuk melihat semua masalah pra-revolusi menuju revolusi. Dus,

---

<sup>59</sup> Ibid., 28.

<sup>60</sup> Ibid., 30.

perempuan hanya perlu membicarakan masalah mereka sendiri seperti sumber air, kebutuhan pangan, dan potensi kerusakan lahan pertanian karena tambang. Proses ini disebut Sandilands sebagai revolusi sebelum revolusi: perempuan mengidentifikasi identitas mereka dan menyadari isu yang perlu diselesaikan di dalam diri mereka sendiri dan kemudian memberi intervensi ke publik.<sup>61</sup>

Selanjutnya Sandilands menekankan bahwa identitas adalah ciptaan yang disengaja. Artinya perempuan petani menjadi subjek penuh dalam konstruksi identitas, bukan memilih karena memang itu adanya (yang tersedia).<sup>62</sup> Sedangkan bahan bakar untuk membentuk identitas bukan diperoleh dari tindakan politik sadar dan kreatif, melainkan melalui aktivitas reproduksi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti melahirkan, memasak, dan mengurus anak (erat dengan hal-hal sensual). Ini adalah usaha untuk mengakui bahwa aktivitas reproduksi perempuan adalah tindakan politik, di mana ini sering diabaikan dan tidak diakui.<sup>63</sup> Jika demikian adanya, maka identitas terbentuk sebelum adanya gerakan sosial, dan perempuan “ada” sebelum dimobilisasi. Oleh karenanya, perempuan petani sudah membentuk identitas mereka sebelum adanya PPLP-KP—bukan diproduksi secara sewenang-wenang—hanya saja perlu bantuan untuk mengungkapnya.

Proses konstruksi identitas juga mendorong seseorang untuk mengidentifikasi kelompoknya, mana yang sesuai dan mana yang tidak; sehingga dari situ solidaritas terbentuk dan memperkuat kelompok.<sup>64</sup> Sebagaimana perempuan petani yang secara aktif bersolidaritas di berbagai pertemuan dan

---

<sup>61</sup> Ibid., 31.

<sup>62</sup> Ibid., 34.

<sup>63</sup> Ibid., 39.

<sup>64</sup> Ibid., 44.



membahas isu seputar reproduksi, lalu mengaitkan dengan masalah sosial yang sedang mereka alami. Maka perempuan tidak boleh dianggap tidak berkontribusi di dalam konflik, apalagi dianggap tidak ada. Justru sejak dari pemilihan identitas itulah perempuan petani masuk ke dalam konflik dan mendorong alam serta wilayah domestik masuk ke dalam isu politik.

### 3. *Politics of Location*: Menguatkan Gerakan Perempuan Lokal

Saya berusaha masuk ke wilayah yang lebih pribadi, yaitu tubuh perempuan dan alam. Maksud “pribadi” di sini adalah pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh entitas di luar dirinya—seperti laki-laki, atau bahkan perempuan lain sekalipun—sehingga perlu penelusuran yang eksklusif. Begitu juga dengan tempat, budaya, dan religiositas yang melingkupinya, adalah aspek-aspek yang memengaruhi proses pembentukan identitas politik perempuan. Ini dilakukan karena menyadari tawaran politik identitas Sandilans belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kumpulan aspek tadi mendorong keterlibatan perempuan di dalam konflik, dan ia terburu-buru memasukkannya ke dalam mangkuk politik feminis dan tradisi gerakan sosial. Perlu pendekatan yang lebih mendalam terhadap lokasi di mana perempuan berada. Hal itu perlu agar perempuan di Negara Dunia Ketiga bisa lepas dari pemikiran yang *eurocentric*, sekalipun itu datang dari pemikiran feminisme.

Merujuk pada pandangan Rosi Braidotti bahwa paradigma *Eurocentric*, peyoratif terhadap yang berbeda dengan mereka, telah mencemari peradaban dunia. Pandangan itu menghegemoni budaya dunia, memaksa setiap individu memiliki

identitas seragam. Bagi mereka yang berbeda, *eurocentric* akan menghukumnya dengan mereduksi subjektivitas dan melabeli mereka sebagai *liyan (otherness)*. Atas nama *humanism*, eurosentris melakukan modernisasi sembari membicarakan liyan dengan nada kelasis, seksis, dan rasis, dan budaya kolonial itu berlangsung hingga sekarang.<sup>65</sup> Dampaknya adalah, setiap individu, bahkan feminisme, mengadopsi pandangan eurosentris sebagai paradigma final tanpa cacat sebagai standar. Alhasil, seringkali pandangan feminisme “pusat” tidak bisa menaungi apa yang dialami perempuan di negara “pinggiran”.

Braidotti mengoreksi, ada perbedaan lokasi yang hebat antara “pusat” dan “pinggiran” yang menentukan cara pandang terhadap kemanusiaan.<sup>66</sup> Dengan kata lain, eurosentris menganggap pembangunan sebagai proyek kesejahteraan, dan negara pinggiran mengadopsinya. Namun bagi perempuan lokal, mereka memiliki standar kesejahteraan sendiri yang sering tidak sejalan dengan feminisme “pusat” yang telah “lebih maju” dalam membicarakan isu perempuan. Alih-alih menyejahterakan, penerapan paradigma eurosentris itu malah menjadikan “pinggiran” menderita. Kondisi yang dirasakan perempuan lokal seperti ini tidak bisa disuarakan secara kongkrit oleh perempuan “pusat”. Untuk itu, menurut Braidotti, perlu adanya *figurasi* perempuan lokal sebagai ekspresi protes berdasarkan *positioning* ruang dan waktu. Figurasi tidak terbatas pada teritorial atau koordinat geopolitik, tapi juga kesadaran terhadap silsilah dan sejarah mereka.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Rosi Braidotti, *The Posthuman* (Cambridge: Polity Press, 2013), 13–15.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>67</sup> Rosi Braidotti, *Transposition On Nomadic Ethics* (Cambridge: Polity Press, 2006), 90.

Figurasi layaknya peta hidup yang terus memperbarui dan menandai sejarah situasi dan kondisi lokal.<sup>68</sup> Ini akan menuntun perempuan petani Kulon Progo, bahwa mereka adalah subjek yang menyadari lokasi di mana mereka berasal dan berada. Dengan begitu, tindakan protes dan perlawanan akan menyesuaikan kondisi budaya, geografi, serta sejarah sebagai semangat perlawanan. Sementara itu, Astrida Neimanis menggunakan air sebagai politik lokasi karena itu adalah elemen yang paling dekat dengan tubuh (*body of water*), secara geografi. Neimanis menyatakan tidak menganggap konsepnya itu lebih baik dari *cyborg*, *nomad*, atau *companion species*. Melainkan ia berusaha untuk mendekati masalah-masalah yang lebih partikular dan khusus, yaitu isu air dan perempuan.<sup>69</sup> Politik lokasi juga memungkinkan bagi perempuan petani Kulon Progo untuk mengenali elemen paling dekat dengan para petani, yaitu pasir besi. Itu adalah lokasi politik perempuan petani, karena hanya mereka yang bisa merasakan dampak kerusakan ekologi pasir besi, sekaligus paling otoritatif membicarakannya. Sebab, persoalan-persoalan itu tidak mungkin disuarakan oleh perempuan urban atau feminisme Barat, karena adanya kesenjangan lokasi, agama, budaya, dan politik.

Perbedaan kondisi perempuan Kulon Progo dengan perempuan Barat, dengan ini, tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan. Perbedaan, sebuah term yang lahir dari pemikiran Barat yang mengandung relasi kuasa untuk mengkolonisasi yang berbeda dari mereka<sup>70</sup>, berusaha direbut tafsirnya untuk

---

<sup>68</sup> Astrida Neimanis, "Feminist Subjectivity, Watered," *Feminist Review* 103, no. 1 (March 1, 2013): 26, accessed June 21, 2021, <https://doi.org/10.1057/fr.2012.25>.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 27–28.

<sup>70</sup> Rosi Braidotti, *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory* (New York: Columbia University Press, 1994), 147.

memperkaya kondisi perempuan di berbagai belahan dunia yang kompleks ini.<sup>71</sup> Sementara itu, Etin Anwar menekankan kepada setiap negara bekas jajahan untuk menciptakan sejarah baru, kedaulatan baru, dan posisi subjek baru. Dalam konteks Indonesia, lanjutnya, memiliki nuansa agama yang sangat kuat, dan ini perlu politik lokasi untuk mengungkapnya sekaligus melepaskan diri dari pikiran kolonial.<sup>72</sup>

Politik lokasi efektif digunakan di wilayah yang multikultural untuk menyelami lokalitas setiap daerah. Dalam hal liberasi, misalnya, feminisme Barat akan menganggap “kerudung” yang dipakai perempuan muslim sebagai simbol penindasan dan pemingitan, oleh karenanya perempuan perlu dibebaskan. Proyek liberasi itu melepaskan kultur dan tafsir agama yang melingkupi perempuan muslim, dalam hal ini perempuan petani Kulon Progo. Cara pandang feminisme Barat tersebut mengasosiasikan gagasan pembebasan itu harus seragam. Sedangkan, level dan ciri penindasan di setiap daerah berbeda-beda. Alih-alih membebaskan, itu malah terjerumus pada pandangan yang hegemonik.<sup>73</sup> Memang feminisme Barat juga beragam, tapi mereka tidak bisa merasakan penderitaan perempuan yang berada di bawah lapisan penindasan: pemerintahan yang patrimonial-kapitalistik, budaya Jawa, tafsir agama yang androsentris, pembangunan yang destruktif, dan kerusakan alam. Oleh karenanya, “perbedaan” itu harus dimaknai secara positif dalam rangka proliferasi gerakan feminis yang bisa menyentuh perempuan lintas identitas dan daerah.

---

<sup>71</sup> Ibid., 148–149.

<sup>72</sup> Etin Anwar, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia*, trans. Nina Nurmila (Bandung: Mizan, 2021), 6.

<sup>73</sup> Ibid., 6–9.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang alami tanpa intervensi peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. *Field research* atau penelitian lapangan bertujuan mengetahui aktivitas suatu kelompok atau budaya masyarakat dengan berinteraksi langsung. Hal tersebut saya maksudkan agar mendapatkan data yang natural dari kehidupan sosial masyarakat yang diteliti.<sup>74</sup> Oleh karenanya, penelitian ini fokus pada perilaku sosial sehari-hari masyarakat seperti diskusi, perkumpulan, negosiasi, pertanian, dan acara kebudayaan.

Kemudian etnografi digunakan sebagai perluasan *field research*. Etnografi memiliki peran mendeskripsikan masyarakat dan budaya yang melingkupi mereka. Ini perlu ditambahkan, sebab masyarakat Kulon Progo menerapkan budaya Jawa secara taat di setiap aktivitas sosialnya. Maka penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana perilaku perempuan petani di dalam masyarakat dengan menginterpretasi simbol-simbol yang ada di dalamnya seperti perayaan, dialog, ritual, dan lain sebagainya.<sup>75</sup> Langkah ini cukup efektif untuk mengungkap perempuan petani di dalam budaya Jawa yang cenderung terbungkam. Dan dengan menangkap simbol-simbol di dalam budaya, adalah cara yang cukup representatif untuk menelusuri kontribusi perempuan di dalam konflik.

---

<sup>74</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Seventh edition. (London: Pearson New International Edition, 2014), 434–435.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 435–436.



Namun kecenderungan peneliti yang menerapkan etnografi justru menuliskan begitu saja apa yang terjadi di masyarakat tanpa membawa alat analisis yang sensitif gender, seperti Clifford Geertz yang mendeskripsikan perempuan berperan di dapur dan terkadang mengintip melalui pagar bambu dalam ritual *slametan*.<sup>76</sup> Itu dinilai tidak kritis dan mengabaikan berbagai unsur di dalam budaya yang menghilangkan suara perempuan. Alhasil, hasil penelitian cenderung melanggengkan maskulinitas budaya—*male-oriented*. Maka etnografi yang berperspektif feminis (*feminist ethnography*) digunakan dalam penelitian ini, agar tujuan mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam konflik tercapai.

Menurut Dána-Ain Davis dan Christa Craven, etnografi feminis adalah kerangka yang memengaruhi jenis penelitian yang dilakukan atau yang mencerminkan epistemologi feminis, seperti bagaimana pengetahuan diproduksi oleh perempuan. Pengguna etnografi feminis harus memasukkan perspektif gender dan politik keadilan sosial dalam kerangka berfikirnya. Hal tersebut diperlukan untuk memproduksi pengetahuan tentang masyarakat dan situasi dalam konteks yang spesifik dengan memperhatikan perbedaan dan ketidakseimbangan kuasa.<sup>77</sup> Oleh karena itu saya tidak hanya mendeskripsikan “apa adanya” tentang apa yang dilakukan perempuan petani di kehidupannya, tapi juga membekali diri dengan perspektif feminis agar mampu mengungkap kontribusi perempuan petani di dalam konflik.

---

<sup>76</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The University of Chicago Press, 1960), 12.

<sup>77</sup> Dána-Ain Davis and Christa Craven, *Feminist Ethnography: Thinking Through Methodologies, Challenges, and Possibilities* (London: Rowman & Littlefield, 2016), 9.



Sebagaimana saran Davis dan Craven, penelitian ini perlu melibatkan kepekaan feminis dan berkomitmen pada kelompok marjinal dan perbedaan kuasa; itu tidak hanya gender, tapi juga ras, identitas, kelas, seksualitas, agama, dan kondisi lokasi penelitian.<sup>78</sup> Dalam implementasinya, perempuan (gender), Jawa, Islam, dan petani akan dimasukkan sebagai irisan identitas yang saling tumpang-tindih melapisi keterbungkaman perempuan petani. Dengan demikian, kesadaran terhadap berbagai aspek tersebut menentukan di mana posisi saya dalam proyek penelitian.

## 2. Sumber Data

Ada dua jenis data yang saya kumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang dijadikan sebagai sumber data primer tersusun dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah perempuan petani Kulon Progo yang menjadi anggota PPLP-KP. Pemilihan tersebut didasarkan pada tujuan mengungkap kontribusi perempuan di dalam konflik secara murni. Sementara syarat anggota PPLP-KP adalah sebagai jaminan bahwa perempuan petani memang menolak tambang pasir besi, sehingga bentuk kontribusinya semakin mudah didapatkan. Kemudian data sekunder adalah petani laki-laki dan buruh tani (baik laki-laki atau perempuan); data ini digunakan untuk menguji sekaligus memperkuat data primer.

---

<sup>78</sup> Ibid., 11.

Jenis data selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data yang siap digunakan dan dianalisa. Pemilihan data ini bertujuan untuk melengkapi sumber data primer.<sup>79</sup> Data-data tersebut antara lain, publikasi jurnal, surat kabar cetak atau daring, data pemerintah, dan catatan organisasi. Data sekunder tersebut akan digunakan selama mendukung data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

*Participant observation*<sup>80</sup> adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik tersebut berguna untuk mendapatkan data penelitian secara natural dari aktivitas perempuan petani. Penentuan *key informan* menggunakan teknik *snowball*,<sup>81</sup> teknik ini mendukung penelitian untuk mendapatkan data dari subjek yang mengalami fenomena sosial secara langsung. Dengan *snowball*, maka data dari petani perempuan akan dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dan pencarian data berhenti ketika data yang diperoleh terasa jenuh atau menghasilkan jawaban yang seragam. *Depth interviews*,<sup>82</sup> teknik ini berfungsi untuk mendapatkan narasi perempuan petani dan cara pandang mereka di dalam konflik. Dengan begitu, kontribusi petani perempuan dapat diketahui langsung dari subjek penelitian. Saya menggunakan rekaman dan catatan lapangan untuk mempermudah proses penelitian, mengingat studi etnografi membutuhkan durasi penelitian yang cukup lama dan berjumpa dengan berbagai aktivitas secara acak.

---

<sup>79</sup> C.R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, Second Revised. (New Delhi: New Age International, 2004), 111.

<sup>80</sup> Ibid., 96.

<sup>81</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, ed. H. Ahmad Tanzeh (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 95.

<sup>82</sup> Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 110.

Beberapa hal perlu dijelaskan, mengenai alasan pemilihan teknik pengumpulan data yang cenderung terang-terangan, sehingga sedikit “menciderai” etnografi yang seharusnya dilakukan secara diam-diam.<sup>83</sup> *Pertama*, lokasi penelitian merupakan wilayah konflik yang sudah cukup sering berjumpa dengan berbagai peneliti, baik yang bertujuan “baik” atau “buruk”, sehingga setiap pendatang harus memiliki alasan jelas untuk bisa berkomunikasi secara intens dengan petani setempat. Konsekuensinya adalah, saya harus menyatakan diri sebagai peneliti dan untuk tujuan apa. Maka, di sinilah saya harus menampakkan diri dan keluar dari balik diri “orang biasa”. *Kedua*, proses penelitian didampingi oleh seorang anggota PPLP-KP sebagai pengantar menuju subjek penelitian sehingga semakin mempersempit kesempatan saya untuk menghindar dari identitas peneliti. Meskipun begitu, teknik yang digunakan tidak mengurangi naturalitas aktivitas petani yang dipotret. Sebab, sebagian besar aktivitas penelitian berada di kehidupan sehari-hari petani. Alhasil, “kendala-kendala” yang telah disampaikan merupakan bagian dari data etnografis yang perlu dianalisa.

Demi keamanan dan keselamatan narasumber, saya memutuskan untuk menyamarkan nama asli narasumber. Sebagai gantinya, beberapa nama narasumber diganti dengan nama bukan asli. Namun ada juga beberapa nama asli yang disebutkan, yaitu nama yang sudah familiar, sering disebut dan masuk media, atau menduduki jabatan penting di organisasi, seperti Widodo.

---

<sup>83</sup> Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 437.

#### 4. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data. Proses ini saya lakukan sejak tahap awal pengumpulan data, dan berlanjut sampai turun ke lapangan. Ketika saya tiba di lapangan, sikap kritis, asumsi, dan pemikiran yang membuat saya datang ke lapangan harus diutamakan dalam melihat jenis dan jumlah data yang bertebaran di lapangan.<sup>84</sup>

Karena ini adalah etnografi, maka catatan perjalanan dibuat agar tidak ada bagian-bagian penting selama studi yang terlewatkan atau terlupakan. Sebab, etnografi memakan waktu yang cukup panjang dan banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk menghindari kemungkinan hal atau peristiwa penting terlintas dan menutup peristiwa penting lainnya. Oleh karenanya, catatan etnografi memudahkan penelitian ini dalam tahap analisa data. Setelah itu, catatan etnografi dikelompokkan bersama hasil wawancara sesuai kategori tema yang ditentukan.<sup>85</sup> Dengan demikian, analisis induktif digunakan untuk mengakomodasi lokalitas perempuan petani Kulon Progo dan keluar dari kungkungan teori dominan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama terdapat dua Bab, yaitu Bab I dan Bab II. Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka

<sup>84</sup> Nicholas Walliman, *Research Methods: The Basic* (New York: Routledge, 2011), 132.

<sup>85</sup> Bobby Harreveld et al., eds., *Constructing Methodology For Qualitative Research* (London: Palgrave Macmillan, 2016), 40–42.

teori, dan sistematika penulisan. Bab II berusaha mengeksplorasi pendahuluan untuk menguatkan sudut pandang. Bagian ini memposisikan petani dan Keraton di dalam konflik dengan merunutnya dari sejarah Keraton Yogyakarta dan pengaturan kepemilikan tanah hingga era modern. Kemudian baru memasukkan posisi perempuan petani di dalam konflik dan hambatan-hambatannya untuk bisa berkontribusi di ruang publik.

Bagian kedua lebih banyak menjelaskan hasil penelitian dan analisa. Bagian ini terdiri dari dua Bab, yaitu Bab III dan Bab IV. Bab III menjelaskan perempuan petani di dalam budaya Jawa dan proses mereka memanfaatkan budaya sebagai ruang intervensi terhadap ruang domestik, publik dan konflik. Budaya Jawa juga menjadi ruang identifikasi masalah-masalah identitas perempuan petani sekaligus menjadi ruang perebutan makna dan permulaan mengintervensi konflik. Kemudian Bab IV mengungkap alasan-alasan perempuan petani terlibat di dalam konflik. Bab ini fokus pada seluk-beluk ekologi pasir besi dan cara pandang perempuan petani terhadap alam. Alasan-alasan perempuan petani mempertahankan ekologi pasir besi ini adalah buntut dari intervensi melalui budaya Jawa hingga akhirnya terbentuk satu wacana yang memperkuat solidaritas.

Bagian ketiga menjadi penutup pembahasan yang berisi satu Bab, yaitu Bab V. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian.

## **BAB V**

### **SUBJEKTIVITAS PEREMPUAN DI DALAM GERAKAN SOSIAL:**

#### **SEBUAH KESIMPULAN**

Bagian ini merupakan simpulan dan temuan saya dalam penelitian ini. Saya menemukan terjadinya konflik karena keserakahan otoritas yang ingin menguasai tanah sekaligus langkah memuluskan tambang pasir besi. Jika feminisme Barat mengatakan tolok ukur keberdayaan perempuan dapat dilihat dari kontribusinya di dalam pembangunan, maka perempuan petani Kulon Progo akan dituduh sebagai anti-keberdayaan. Namun kembali lagi, bahwa perbedaan lokasi akan menentukan pengalaman dan level ketertindasan; dan oleh karenanya makna “berdaya” juga memiliki tafsir yang berbeda. Suara perempuan petani harus didengarkan langsung untuk mengetahui itu, tanpa perantara.

Identitas sebagai petani, perempuan, Jawa, dan Islam, adalah kumpulan yang menentukan subjektivitas perempuan petani sekaligus sebagai bekal menentukan politik feminis. Perempuan memiliki pengalaman yang layak untuk menyuarakan ketertindasan mereka. Kumpulan identitas itu menjadi sarana yang menyatukan perempuan saling mengenali siapa kreator konflik dan apa dampaknya terhadap mereka. Dengan begitu, sesama perempuan berhasil menemukan kesamaan di dalam konflik, yaitu terancam kehilangan tanah dan sumber ekonomi. Dan akhirnya solidaritas berhasil terbentuk untuk melawan kreator konflik.

Saya menemukan alasan yang lebih radikal kenapa perempuan harus terlibat di dalam konflik dan memilih pasir besi dari pada tambang. Adalah keselamatan dirinya dan keluarga di masa depan. Gambaran kepastian dan kesejahteraan hidup



sudah didapatkan perempuan petani melalui bertani. Dengan alasan itu, tawaran kesejahteraan berwujud tambang tidak bisa menggantikan kesejahteraan yang sedang dinikmati. Pengetahuannya tentang nilai-nilai Jawa dan Islam menguatkan tekad petani untuk terus mempertahankan pasir besi. Untuk uraian temuan yang lebih lanjut, saya akan menampilkan melalui pembagian beberapa sub-bab agar lebih rinci.

#### **A. Menolak Subordinasi Gender**

Perempuan petani memiliki hubungan langsung dengan Keraton di dalam konflik, bukan melalui perantara laki-laki. Pandangan itu cenderung tertutup dan terpinggirkan, sebab pandangan dominan mengatakan perempuan Jawa selalu tunduk kepada laki-laki, *menut*, *sopan*, dan *halus*. Oleh karenanya, ia sering dinomorduakan dan kurang diperhitungkan kontribusinya di dalam masyarakat, terlebih di dalam gerakan sosial. Dan, Keraton sebagai otoritas budaya Jawa juga terlibat dalam pembentukan pandangan dominan tersebut. Namun, kehadiran Keraton di era modern seolah ingin mengeluarkan perempuan dari lubang subordinasi budaya Jawa yang disediakan oleh Keraton sendiri. Adalah pembangunan, sebuah proyek “besar” Negara Dunia Ketiga yang gagap menghadapi kemajuan Negara Dunia Pertama. Keraton berusaha mengubah pandangan dominan perempuan Jawa sebelumnya, menjadi orang yang bisa berprestasi di ruang publik dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Usaha Keraton menghadirkan kemajuan dan menarik perempuan ke sana adalah tidak ubahnya menyediakan lubang subordinasi baru di dalam proyek

kemajuan, yang seolah-olah keluar dari keterpurukan. Ia ingin mengubah peran gender perempuan petani yang dianggap nir-prestasi menjadi peran gender dalam pembangunan yang dianggap prestasi. Tapi subjektivitas perempuan petani membawanya ke arah keberdayaan. Ia menolak dua pandangan: ter subordinasi di dalam budaya Jawa dan berdaya di dalam pembangunan.

*Pertama*, perempuan petani memodifikasi budaya Jawa menjadi ruang yang berguna untuk memberdayakan diri. Ia menunjukkan pandangan Jawa yang sejati dengan merawat hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Keluarga (mikrokosmos) dan pertanian (alam/makrokosmos) menjadi penggerak perempuan untuk tersalur langsung melawan otoritas Keraton yang menindas. Mengurus keluarga bukan dipandang sebagai penerimaan beban gender, melainkan acuan hidup sebagai manusia Jawa yang utuh; dalam konteks masyarakat petani, kepastian keselamatan keluarga di hari ini dan di masa depan menjadi pendorong untuk menolak tambang pasir besi yang digerakkan oleh Keraton. Kemudian, pasir besi (alam) adalah jaminan keselamatan menjadi manusia Jawa. Sebab, di sana semua kebutuhan pangan, ekonomi mandiri, dan keberlangsungan hidup keluarga terjamin, yaitu dengan menjadi petani. Keterikatan mikrokosmos dan makrokosmos itu yang tidak ditawarkan proyek kemajuan. Alih-alih menawarkan, justru yang terjadi adalah menghancurkan hubungan keduanya. Jika demikian, proyek kemajuan akan menghilangkan kesejatian budaya Jawa; dan perempuan berada di garis terdepan yang mempertahankannya.

*Kedua*, perempuan petani mampu mengidentifikasi bahwa menerima proyek kemajuan sama saja menyerahkan diri kepada ketidakberdayaan.

Mengawali sejarah sebagai petani, membuat perempuan merefleksikan diri bahwa kehidupan dan citra keberdayaan tergantung pada pasir besi. Ketika pasir besi diubah menjadi wilayah pertambangan, dan perempuan menerimanya, yang terjadi kemudian adalah hilangnya ruang yang memberdayakan. Seagala keahlian dalam bertani tidak akan berguna ketika pasir besi tidak ada. Perempuan, selanjutnya, harus mengasah kemampuan lain yang kompatibel dengan proyek kemajuan; dan di saat yang bersamaan mereka harus memikirkan keluarga yang berada di ambang ketidaksielamatan, sebab ia tidak bisa meninggalkan peran tersebut. Akhirnya, perempuan menyadari bahwa proyek kemajuan hanya menyediakan beban gender yang tidak diinginkan sama sekali.

Terlihat ada dua arus yang bergerak mengonstruksi gender, yaitu Keraton dengan ideologi pembangunannya dan budaya Jawa. Namun semua kembali kepada perempuan dengan subjektivitasnya, yang mampu mengintervensi ke mana peran gender mereka akan diarahkan. Perempuan petani memiliki agenda dan pilihan, dan mereka memilih mengintervensi tafsir sosial budaya Jawa untuk memukul mundur ideologi pembangunanisme sekaligus Keraton sebagai induk semangnya.

#### **B. Gerakan Perempuan Lokal: Melebur dalam Budaya Jawa, Menyatu dengan Alam**

Budaya Jawa pada mulanya memang berisi nilai-nilai patriarkal sebelum akhirnya perempuan petani mengintervensinya dan menjadikannya ruang melakukan penolakan tambang. Melalui *slametan*, wilayah kerja domestik yang sering dianggap membelenggu perempuan, pada kenyataannya dimanfaatkan perempuan

untuk bertukar informasi antar generasi dan menafsir dunia sosial petani. Dari sana perempuan bisa bebas membicarakan apa yang dirasakan sesama perempuan, bertukar pengalaman, dan merencanakan agenda politik perempuan demi keutuhan dunia Jawa.

Melakukan pekerjaan domestik, seperti memasak dan mengurus keluarga, bukanlah “beban gender” yang diafirmasi begitu saja oleh perempuan, seolah-olah ia tidak memiliki kemampuan menolak dan memilih. Melainkan itu adalah tindakan kepedulian perempuan yang tumbuh seiring mereka bertindak sesuai peran gender di dalam dunia Jawa, yang juga merupakan tindakan merawat mikrokosmos. Kemudian menjadi petani, adalah peran gender yang direproduksi sehari-hari mengikuti keadaan sosio-geografis Kulon Progo. Pertanian juga menumbuhkan kesadaran perempuan untuk terlibat di dalam gerakan sosial karena itu sesuai dengan nilai budaya Jawa yang berarti menjaga makrokosmos.

Dua kosmos tersebut pada akhirnya disadari memiliki hubungan erat, hingga membedakan konsep ruang domestik dan publik antara Barat dan Jawa. Melalui konsep *slamet*, ruang domestik dan publik Jawa memiliki keterkaitan. Bagi perempuan, ruang domestik adalah langkah awal yang harus dilalui sebelum tersalur ke ruang publik. Dalam konteks masyarakat petani, perempuan akan mengutamakan keselamatan keluarga, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan alam (pasir besi). Ini yang memicu perempuan turut hadir di dalam gerakan sosial meski ada berbagai norma sosial yang mempersulitnya. Namun secara perlahan, norma-norma sosial itu bisa diatasi dan ditafsir ulang oleh perempuan petani melalui ritual *slametan*, walaupun tidak mudah.

Pasir besi (alam) memiliki tempat khusus dalam pandangan petani perempuan. Di sana tercermin keselamatan keluarga dan masa depan yang sejahtera. Imajinasi keselamatan tidak bisa dilepaskan dari pasir besi. Dengan bertani, maka setiap tanaman yang ditanam akan berbuah perlawanan. *Slamet*, berkat tafsir perempuan petani, memiliki makna radikal karena melibatkan alam sebagai entitas aktif yang berusaha menyelamatkan dunia Jawa.

Budaya Jawa secara murni mengalir di aras pedesaan, dalam hal ini masyarakat petani Kulon Progo. Maka, masyarakat petani, khususnya perempuan, sudah seharusnya menjadi narasumber resmi budaya Jawa. Perempuan petani bukan hanya melawan kebijakan destruktif Keraton, tapi juga melawan tafsir budaya Jawa yang terkontaminasi pembangunanisme. Dengan artian, perempuan menunjukkan bagaimana seharusnya budaya Jawa berjalan dan mengapa alam menjadi entitas penting yang harus diperhatikan keberlangsungannya. Sebaliknya, Keraton adalah antagonis dalam budaya Jawa karena ia hadir untuk menceraikan dua kosmos, dengan konsekuensi merusak dunia Jawa beserta manusianya.

Berbagai rentetan dampak sosial, politik, dan ekonomi di masa depan, gerakan sosial hadir dan perempuan berada di dalamnya, berkontribusi menyelamatkan dunia Jawa. Perempuan petani menggandeng budaya Jawa dan alam sebagai unsur *slamet*, dan menuding Keraton sebagai penghalang keadaan *slamet*. Dengan demikian, perempuan bukanlah entitas pasif dan penerima manfaat dari gerakan sosial. Jauh dari itu, ia adalah subjek aktif yang memiliki kemampuan menafsirkan keadaan *slamet* serta bagaimana cara mewujudkan dan mempertahankannya.

### C. Masa Depan Perempuan di dalam Gerakan Sosial

Ekofeminisme sejak lama menaruh sinis terhadap laki-laki dan budaya, menuduh mereka sebagai akar penindasan. Hal yang esensial itu malah menjerumuskan mereka menuju jurang penerimaan beban gender: mengakui perempuan bersama alam secara identik tertindas, dan memiliki tugas membersihkan kekacauan alam sedangkan laki-laki sebagai penerima manfaatnya. Penelitian ini pada dasarnya tidak menyinggung ekofeminisme secara khusus. Namun karena berkaitan dengan ekologi, penelitian ini secara tidak langsung memiliki hubungan dekat dan merasa bertanggung-jawab atas kesinisan ekofeminisme terhadap metafora perempuan/alam dan laki-laki/budaya.

Penemuan ini mencoba menawarkan kelenturan hubungan antara alam, budaya, laki-laki, dan perempuan, yang memungkinkan kesemuanya terintegrasi di dalam satu gerakan sosial. Aspek interesksionalitas perlu dimasukkan dalam pemikiran ekofeminisme untuk mempertajam analisa<sup>1</sup> dan memintanya melihat aspek subjektivitas perempuan ketika mereka “memilih” bergabung ke dalam gerakan bersama laki-laki untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Dengan begitu, relasi gender yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan tidak melulu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan salah satu jenis kelamin. Melainkan sebagai pilihan yang terus-menerus diperbaiki dan dimodifikasi untuk membentuk idealitas budaya.

---

<sup>1</sup> A.E. Kings, “Intersectionality and the Changing Face of Ecofeminism,” *Ethics and the Environment* 22, no. 1 (2017): 72, accessed May 3, 2021, <https://www.jstor.org/stable/10.2979/ethicsenviro.22.1.04>.



Beban gender memang ditemukan di dalam budaya dan relasi sosial. Tapi peneliti harus melibatkan diri di dalam pusran budaya dan mengakui subjektivitas perempuan agar mengetahui bagaimana perempuan melakukan usaha untuk lepas dari beban gender tersebut. Pada tahap yang lebih radikal, perempuan berusaha mengubah tafsir sosial dan relasi antara manusia (baik laki-laki atau perempuan) dan alam, sedangkan budaya adalah saluran perjuangannya. Tentunya ini sangat lokalistik, dan subjektivitas perempuan membantu perempuan dalam bernegosiasi di dalam budaya.

Dengan rentetan proses di dalam konflik, perempuan petani berhasil menyulam politik feminisme lokal. Melalui *slametan*, yang sebelumnya perempuan hanya berada di bagian belakang, menjadi yang paling terdepan (dalam melawan) ketika terjadi ancaman kerusakan alam. Jika pada umumnya laki-laki yang mengambil alih bagian doa, perempuan petani Kulon Progo ikut andil dalam mendoakan untuk keselamatan alam sekaligus melawan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "COVID-19: Threat and Fear in Indonesia." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 12, no. 5 (2020): 488. Accessed April 8, 2021. <https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-41738-001.pdf>.
- Abrahamson, Mark. "Functional, Conflict and Neofunctional Theories." In *Handbook of Social Theory*, edited by George Ritzer and Barry Smart. London: SAGE Publications, 2001.
- Adminwates. "DPMPT - Booklet 2017 - Peta Kabupaten Kulon Progo." *dmppt.kulonprogokab.go.id*. Last modified November 11, 2019. Accessed December 1, 2020. <https://dmppt.kulonprogokab.go.id/detil/707/booklet-2017-peta-kabupaten-kulon-progo>.
- Afandi, Muhammad. "Deklarasi Perjuangan Warga Pesisir Selatan Kulon Progo." *Selamatkanbumi.com*, May 11, 2016. Accessed March 26, 2021. <http://selamatkanbumi.com/id/deklarasi-perjuangan-warga-pesisir-selatan-kulon-progo/>.
- Alatas, Syed Hussein. *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass, 1997.
- Alcoff, Linda. "Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory." *Signs* 13, no. 3 (1988): 405–436. Accessed January 1, 2021. <https://www.jstor.org/stable/3174166>.
- Andalas, Eggy Fajar. "Cerita Rakyat Dan Tradisi Masyarakat Agraris Nusantara." In *Kisah-Kisah Perempuan Dan Cerita Rakyat Nusantara*, edited by Puji Karyanto. Surabaya: Magister Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga, 2018.
- Anderson, Benedict R. O'G. *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Translated by Revianto Budi Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.
- . "The Idea of Power in Javanese Culture." In *Culture and Politics in Indonesia*, edited by Claire Holt, 1–70. Singapore: Equinox Publishing, 2007.

- Anggraeni, Tyas Dian. "Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Rechts Vinding* 1, no. 1 (2012): 52–74.
- Anggraini, Putu M. R. "Keindahan Dewi Sri Sebagai Kemakmuran dan Kesuburan di Bali." *Jñānasiddhānta* (n.d.): 21–30.
- Anwar, Etin. *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia*. Translated by Nina Nurmila. Bandung: Mizan, 2021.
- . *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*. Translated by Kurniasih. Bandung: Mizan, 2017.
- Apriando, Tommy. "Ketika Lahan Subur Warga Tergusur Demi Bandara Baru Yogyakarta (Bagian 1)." *Mongabay Environmental News*. Last modified December 12, 2017. Accessed February 23, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2017/12/12/ketika-lahan-subur-warga-tergusur-demi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-1/>.
- . "Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang Pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Right)." *Jurnal Perempuan* 20, no. 3. 86 (2015).
- Aqil, A. Muh. Ibnu. "Govt Issues Jobs Law Rules as Legal Challenges Lag." *The Jakarta Post*. Last modified February 27, 2021. Accessed April 9, 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/02/27/govt-issues-jobs-law-rules-as-legal-challenges-lag.html>.
- Asriani, Desinta D. "Perempuan Mollo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Muntis." In *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim dan Memori Rahim*, 125–139. III. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- Aswiyati, Indah. "Makna Dan Jalannya Upacara 'Puputan' Dan 'Selapanan' Dalam Adat Upacara Tradisional Kelahiran Bayi Bagi Masyarakat Jawa." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* VIII, no. 16 (2015): 1–10. Accessed January 11, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/10762>.
- Azca, Muhammad Najib, Hakimul Ikhwan, and Moh Zaki Arrobi. "A Tale of Two Royal Cities: The Narratives of Islamists' Intolerance in Yogyakarta and Solo." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019): 25–50.

- Balairung. "Majalah Balairung Edisi 55: Melawan Perampasan, Merebut Hak Atas Tanah." *Issuu*. Last modified 2019. Accessed November 20, 2020. [https://issuu.com/balairungpress/docs/majalah\\_55](https://issuu.com/balairungpress/docs/majalah_55).
- Baso, Ahmad. *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*. Cet. 2 (Revisi). Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2016.
- Beets, Willem C. *Multiple Cropping and Tropical Farming System*. Boca Raton: CRC Press, 1982.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. New York: Routledge, 1994.
- BPKP. "Profil Kabupaten Kulon Progo." *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*. Accessed December 1, 2020. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/Profil-Kabupaten-Kulonprogo>.
- Braidotti, Rosi. *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*. New York: Columbia University Press, 1994.
- . *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press, 2013.
- . *Transposition On Nomadic Ethics*. Cambridge: Polity Press, 2006.
- Branswell, Helen, and Andrew Joseph. "WHO Declares the Coronavirus Outbreak a Pandemic." *STAT*, March 11, 2020. Accessed April 8, 2021. <https://www.statnews.com/2020/03/11/who-declares-the-coronavirus-outbreak-a-pandemic/>.
- Brenner, Suzanne. "Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and 'The Veil.'" *American Ethnologist* 23, no. 4 (1996): 673–697. Accessed April 18, 2021. <https://www.jstor.org/stable/646178>.
- van Bruinessen, Martin. "Review of Inside Indonesian Society; Cultural Change in Java." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154, no. 4 (1998): 646–649. Accessed February 5, 2021. <https://www.jstor.org/stable/27865470>.
- Butler, Judith. *Bodies That Matter*. New York: Routledge, 1993.
- . *Gender Trouble: Feminist and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1999.

- . “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory.” *Theatre Journal* 40, no. 4 (1988): 519–531. Accessed March 30, 2021. <https://www.jstor.org/stable/3207893>.
- Candraningrum, Dewi. *Negotiating Women’s Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia*. Thailand: IRASEC, 2013.
- . “The Spiritual Politics of the Kendeng Mountains Versus the Global Cement Industry.” In *After the Death of Nature: Carolyn Mercant and the Future of Human Nature Relation*, edited by Kenneth Worthy, Elizabeth Allison, and Whitney A. Bauman, 219–234. New York: Routledge, 2019.
- Carey, Peter. *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. Second edition. Netherlands: KITLV Press, 2008.
- Crenshaw, Kimberle. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–1299. Accessed December 27, 2019. <https://www.jstor.org/stable/1229039>.
- . “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” *Stanford Law Review* 43, no. 6 (June 1991): 1241–1299. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stflr43&id=1257&div=&collection=>.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press, 1959.
- Damarjati, Danu. “Sultan: Tak Ada Lagi Yang Protes Tambang Pasir Besi Kulon Progo.” *News.Detik.Com*. Last modified October 10, 2017. Accessed April 10, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-3678729/sultan-tak-ada-lagi-yang-protes-tambang-pasir-besi-kulon-progo>.
- Danar, Widiyanto. “PLN Sambung 35 Titik Listrik Irigasi Pertanian.” *KRJogja*. Last modified December 25, 2020. Accessed April 6, 2021. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/pln-sambung-35-titik-listrik-irigasi-pertanian/>.



- Davis, Dána-Ain, and Christa Craven. *Feminist Ethnography: Thinking Through Methodologies, Challenges, and Possibilities*. London: Rowman & Littlefield, 2016.
- Dekker, Brigitte. *The Impact of COVID-19 Measures on Indonesian Value Chains*. Clingendael Institute, 2020. Accessed October 18, 2020. <https://www.jstor.org/stable/resrep25674>.
- Dewantara, Jalu Rahman. "Begini Kabar Kelanjutan Proyek Tambang Pasir Besi Di Kulonprogo." *Harianjogja.Com*. Last modified July 17, 2020. Accessed April 10, 2021. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/514/1044697/begini-kabar-kelanjutan-proyek-tambang-pasir-besi-di-kulonprogo>.
- Dzuhayatin, Siti. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, Dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press & Pustaka Pelajar, 2015.
- Elmhirst, Rebecca, Mia Siscawati, and Carol J. Pierce Colfer. "Revisiting Gender and Forestry in Long Segar, East Kalimantan, Indonesia: Oil Palm and Divided Aspiration." In *Gender and Forest: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues*, edited by Carol J. Pierce Colfer, Bimbika Sijapati Basnett, and Marlene Elias, 300–317. New York: Routledge, 2016.
- Everingham, Phoebe, and Natasha Chassagne. "Post COVID-19 Ecological and Social Reset: Moving Away from Capitalist Growth Models towards Tourism as Buen Vivir." *Tourism Geographie* 22, no. 3 (May 12, 2020): 555–566.
- Floyd-Wilson, Mary, and Garrett A. Sullivan, Jr. "Introduction: Inhabiting the Body, Inhabiting the World." In *Environmental and Embodiment in Early Modern England*, edited by Mary Floyd-Wilson and Garrett A. Sullivan, Jr, 1–13. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Foucault, Michel. *Society Must Be Defend*. Translated by David Macey. New York: Picador, 2003.
- Gaard, Greta. "Living Interconnections with Animals and Nature." In *Ecofeminism: Women, Animal, Nature*, edited by Greta Gaard, 1–13. USA: Temple University Press, 1993.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press, 1960.



- Giacomini, Terran. "Ecofeminism and System Change: Women on the Frontlines of Struggle Against Fossil Capitalism and for the Solar Commons." *Canadian Woman Studies* 31, no. 1–2 (2016): 95–100. Accessed May 13, 2020. <https://cws.journals.yorku.ca/index.php/cws/article/view/37530>.
- Gökarıksel, Banu, and Ellen McLarney. "Introduction: Muslim Women, Consumer Capitalism, and the Islamic Culture Industry." *Journal of Middle East Women's Studies* 6, no. 3 (2010): 1–18. Accessed April 18, 2021. <https://www.jstor.org/stable/10.2979/mew.2010.6.3.1>.
- Hardiyan, Yodie. "Pasca-vonis, Istri Tukijo PPLP Masih Tertutup." *Solopos.com*. Last modified August 25, 2011. Accessed April 1, 2021. <https://www.solopos.com/pasca-vonis-istri-tukijo-pplp-masih-tertutup-148573>.
- Harreveld, Bobby, Mike Danaher, Celeste Lawson, Bruce Allan Knight, and Gillian Busch, eds. *Constructing Methodology For Qualitative Research*. London: Palgrave Macmillan, 2016.
- Hartmann, Heidi. "Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex." *Signs* 1, no. 3 (1976): 137–169. Accessed December 6, 2020. <https://www.jstor.org/stable/3173001>.
- Hastuti, Sri. "Merayakan Sang Dewi Sri." *Majalah Gong*, 70/VII 2005.
- Heringa, Rens. "Dewi Sri in Village Garb Fertility, Myth, and Ritual in Northeast Java." *Asian Folklore Studies* 56, no. 2 (2014): 355–377. <http://www.jstor.org/stable/1178731>.
- Hidayah, Kurniatul. "Pasir Besi Kulonprogo Diuji Di China." *TribunJogja*. Last modified September 29, 2020. Accessed January 14, 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2020/09/29/pasir-besi-kulonprogo-diuji-di-china>.
- Hilmy, Masdar. "Islam and Javanese Acculturation: Textual and Contextual Analysis of the Slametan Ritual." Tesis, McGill University Montreal, 1999. Accessed January 3, 2021. [https://www.academia.edu/891910/Islam\\_and\\_Javanese\\_acculturation\\_textual\\_and\\_contextual\\_analysis\\_of\\_the\\_slametan\\_ritual?auto=download](https://www.academia.edu/891910/Islam_and_Javanese_acculturation_textual_and_contextual_analysis_of_the_slametan_ritual?auto=download).

- . “Towards a Religiously Hybrid Identity? The Changing Face of Javanese Islam.” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 1 (2018): 45–68. Accessed January 8, 2021. <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/561>.
- Hirawan, Fajar B., and Akita A. Verselita. “Ensuring Food Security in Indonesia During Covid-19.” News. *The Jakarta Post*. Last modified May 4, 2020. Accessed October 18, 2020. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/04/ensuring-food-security-in-indonesia-during-covid-19.html>.
- Huang, Chaolin, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, et al. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China.” *The Lancet* 395, no. 10223 (February 15, 2020): 497–506. Accessed April 8, 2021. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30183-5/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/abstract).
- Huda, Miftahul. “Petani Dalam Pusaran Modernisasi: Studi Kasus Petani Perempuan Karangsewu.” *An Nisa’a* Vol. 14, no. 1 (2019): 107–118.
- Huda, Miftahul, and Alfa Chusna. “Empowering Female Farmers Against Mining Capitalism.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (April 21, 2020): 127–146. Accessed September 15, 2020. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/5311>.
- Humas. “Pengelolaan Pasir Besi Harus Sesuai AMDAL - Berita | Portal Pemda DIY.” *jogjaprov.go.id*. Last modified September 29, 2020. Accessed January 14, 2021. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8890-pengelolaan-pasir-besi-harus-sesuai-amdal>.
- Institute for Global Environmental Strategies. *Implications of COVID-19 for the Environment and Sustainability*. Institute for Global Environmental Strategies, 2020. Accessed April 12, 2021. <https://www.jstor.org/stable/resrep24951>.
- IPAC. *Mesuji: Anatomy of an Indonesian Land Conflict*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2013. Accessed May 5, 2020. [https://www.jstor.org/stable/resrep07804.1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/resrep07804.1#metadata_info_tab_contents).
- Isnadi, Yuli. “Mengurai Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo.” *MAP Corner-Klub MKP UGM*, February 3, 2017. Accessed March 27, 2021.

<https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/mengurai-konflik-tambang-pasir-besi-kulon-progo/>.

Jati, Wasisto Raharjo. "Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 10 (2013): 85–111.

Jogja Darurat Agraria. *Perempuan Tonggak Penyelamat Agraria*, 2017. Accessed March 31, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=IXAjsGkcGRo>.

jogjapedia.net. "Tradisi Grebeg Maulid Keraton Yogyakarta." *JogjaPedia*. Last modified April 6, 2015. Accessed January 3, 2021. <http://jogjapedia.net/acara-budaya/tradisi-grebeg-maulid-keraton-yogyakarta/>.

Johnson, Christine K., Peta L. Hitchens, Pranav S. Pandit, Julie Rushmore, Tierra Smiley Evans, Cristin C. W. Young, and Megan M. Doyle. "Global Shifts in Mammalian Population Trends Reveal Key Predictors of Virus Spillover Risk." *Proceedings. Biological Sciences* 287, no. 1924 (April 8, 2020): 1–10.

Jordan, Rosan A., and F. A. de Caro. "Review Essay: Women and the Study of Folklore." *Signs* (1986): 500–519.

Kammer, Miriam. "Breaking the Bounds of Domesticity: Ecofeminism and Nature Space in Love's Labour's Lost." *Shakespeare Bulletin*, 2018. Accessed March 27, 2020. <https://muse.jhu.edu/article/707370>.

Kartika, Titiek. *Perempuan Lokal VS Tambang Pasir Besi Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Kasuma, Gayung. *Dari Privat ke Publik: Kehidupan Seksual di Jawa Awal Abad ke-20*. Temanggung: Kendi, 2020.

Kementerian PPN/Bappenas. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah, Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan," July 28, 2019.

Kings, A.E. "Intersectionality and the Changing Face of Ecofeminism." *Ethics and the Environment* 22, no. 1 (2017): 63–87. Accessed May 3, 2021. <https://www.jstor.org/stable/10.2979/ethicsenviro.22.1.04>.

- Koentjaraningrat. "The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization. Hildred Geertz." *American Anthropologist* 64, no. 4 (1962): 872–874. Accessed April 24, 2021. <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1525/aa.1962.64.4.02a00310>.
- Koes, Arif. "Melawan 15 Tahun, Petani Kulonprogo Tolak Tambang Pasir Besi." *Gatra.Com*. Last modified April 1, 2021. Accessed April 8, 2021. <https://www.gatra.com/detail/news/508118/gaya-hidup/melawan-15-tahun-petani-kulonprogo-tolak-tambang-pasir-besi>.
- Kothari, C.R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. Second Revised. New Delhi: New Age International, 2004.
- Kramer, Tom. "Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar." *Social Research: An International Quarterly* 82, no. 2 (July 24, 2015): 355–374. Accessed May 5, 2020. <https://muse.jhu.edu/article/587495>.
- KumparanNEWS. "Para Perempuan di Teras Keraton Yogyakarta." *kumparan*. Last modified April 11, 2018. Accessed December 15, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/para-perempuan-di-teras-keraton-yogya>.
- Kuntadi. "Pasang Ratusan Spanduk, Petani Pesisir Kulonprogo Tolak Tambang Pasir Besi." *iNews.ID*. Last modified April 1, 2021. Accessed April 8, 2021. <https://yogya.inews.id/berita/pasang-ratusan-spanduk-petani-pesisir-kulonprogo-tolak-tambang-pasir-besi>.
- . "PT JMI Kirim Konsentrat Pasir Besi ke China, Warga Masih Pro Kontra Pembangunan Pabrik." *iNewsYogya.ID*. Last modified July 20, 2020. Accessed April 10, 2021. <https://yogya.inews.id/berita/pt-jmi-kirim-konsentrat-pasir-besi-ke-china-warga-masih-pro-kontra-pembangunan-pabrik>.
- Kuntowijoyo. *Budaya Dan Masyarakat*. Edisi paripurna. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kurniadi, Bayu Dardias. "Defending the Sultan's Land: Yogyakarta, Aristocratic Power and Control over Land in Post-Autocratic Indonesia." Disertasi, Australian National University, 2019. Accessed March 26, 2021. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/200940>.

- Kurniawan, Andri, and Mohammad Isnaini Sadali. *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Cet. 2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Kusumoharyono, Umar. "Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5/1960." *Yustisia* 68 (2006): 1–5.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Translated by Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, and Nini Hidayati Yusuf. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- MacLennan, Gregor. "Maintaining Marx." In *Handbook of Social Theory*, edited by George Ritzer and Barry Smart. London: SAGE Publications, 2001.
- Mangililo, Ira D. "Bumi Sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo Melawan Tambang Mangan." In *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim*, edited by Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, 173–185. Seri III. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- Mann, Susan A. "Pioneers of U.S. Ecofeminism and Environmental Justice." *Feminist Formations* 23, no. 2 (August 20, 2011): 1–25. Accessed May 29, 2020. <https://muse.jhu.edu/article/448629>.
- Mas'udi. "Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Accessed June 3, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/14973/>.
- Maula, M. Jadul. *Islam Berkebudayaan: Akar Kearifan Tradisi, Ketatanegaraan, dan Kebangsaan*. Sleman: Pustaka Kaliopak, 2019.
- Merchant, Carolyn. *Autonomous Nature: Problems of Prediction and Control From Ancient Times to The Scientific Revolution*. New York: Routledge, 2016.
- . *Radical Ecology: The Search for Livable World*. 2nd ed. New York: Routledge, 2005.
- . "The Scientific Revolution and The Death of Nature." *Isis* 97, no. 3 (2006): 513–533.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite*. Translated by Mary Jo Lakeland. Canada: Perseus Books, 1991.



- Mies, Maria, and Vandana Shiva. *Ecofeminism*. 2nd edition. New York: Zed Books, 2014.
- Mulyono, Agus Joko. "Pasir Besi di Kulon Progo Dihidupkan, Sultan: Proses Diatur." *Tagar.id*. Last modified September 30, 2020. Accessed April 10, 2021. <https://www.tagar.id/pasir-besi-di-kulon-progo-dihidupkan-sultan-proses-diatur>.
- Mustain. *Petani vs. Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Nedia, 2017.
- Mustaqim, Ahmad. "Digembosi, PPLP Tetap Bernyali." *medcom.id*. Last modified April 8, 2020. Accessed March 14, 2021. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/5b2XAjnK-digembosi-pplp-tetap-bernyali>.
- Nanthini, S., and Tamara Nair. *COVID-19 and the Impacts on Women*. Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, July 5, 2020. Accessed April 8, 2021. <https://www.jstor.org/stable/resrep26875>.
- Neimanis, Astrida. "Feminist Subjectivity, Watered." *Feminist Review* 103, no. 1 (March 1, 2013): 23–41. Accessed June 21, 2021. <https://doi.org/10.1057/fr.2012.25>.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh edition. London: Pearson New International Edition, 2014.
- Noya, Andris. "Urgensi Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Dalam Mengatasi Krisis Ekologis: Kajian Ekofeminisme." In *Ekofeminisme: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, Dan Budaya*, 117–137. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Nugroho, Argoposo C. "Bertani Di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi." In *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, Dan Memori Rahim*, edited by Dewi Candraningrum and Arianti Ina Restiani Hunga, 103–124. III. Yogyakarta: Jalasutra, 2015.
- Okezzone. "31,86% Penduduk Kerja Indonesia Ada di Sektor Pertanian : Okezzone Economy." <https://economy.okezzone.com/>. Last modified May 5, 2017. Accessed January 14, 2021.



<https://economy.okezone.com/read/2017/05/05/320/1683895/31-86-penduduk-kerja-indonesia-ada-di-sektor-pertanian>.

Pamungkas, Onok Yayang, Sahid Teguh Widodo, Suyitno, and Suwardi Endraswara. "Ecocriticism: Javanese Cosmology and Ecoethic in Tetralogy Romance by Ki Padmasusastra." *Atlantis Press* 280 (2018): 480–489.

Parlindungan, Utan. *Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta*. Vol. 2. no. 1. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik, 2008.

Pasaribu, Luxi R. "Gambaran Kondisi Pertambangan Batu Bara Pada Kejadian Status Gizi Ibu Hamil Di Provinsi Kalimantan Selatan (Analisis Lanjut Riskesdas 2007)." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vol. 5, no. 3 (2014): 135–143.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. "PT.JMI Dan Pemkab Kulon Progo Bahas Pabrik Pengelolaan Pasir Besi." *Kulonprogokab.Go.Id*. Last modified July 21, 2021. Accessed April 10, 2021. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7769/ptjmi-dan-pemkab-kulon-progo-bahas-pabrik-pengelolaan-pasir-besi>.

Perkasa, Anugrah. "Kulonprogo: Menuju Era Tambang Pasir Besi." *Bisnis.com*. Last modified December 14, 2013. Accessed December 6, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20131214/78/192411/kulonprogo-menuju-era-tambang-pasir-besi>.

Permanadeli, Risa. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern*. Translated by Stephanus Aswar Herwinarko. Sleman: Pustaka Ifada, 2015.

Priatmojo, Galih. "Sutedjo Desak Jogja Magasa Iron Segera Bangun Pabrik di Kulon Progo." *suarajogja.com*. Last modified January 5, 2020. Accessed April 10, 2021. <https://jogja.suara.com/read/2020/01/05/201000/sutedjo-desak-jogja-magasa-iron-segera-bangun-pabrik-di-kulon-progo>.

Putsanra, Dipna Videlia. "Perempuan dalam Pusaran Politik Keraton Jawa dan Yogya." *tirto.id*. Last modified October 4, 2017. Accessed December 16, 2020. <https://tirto.id/perempuan-dalam-pusaran-politik-keraton-jawa-dan-yogya-cxLp>.

- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Rachman, Noer Fauzi. *Panggilan Tanah Air*. Cet. ke-3. Yogyakarta: INSISTPress, 2017.
- . *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Cetakan kedua. INSISTPress, 2017.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Translated by Nurhadi. Cetakan ke-10. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Rizky, Awaik, and Nasyith Majidi. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing Company, 2008.
- Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter, and E. Wangari. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London: Routledge, 1996.
- Ros-Tonen, Mirjam A. F., and Mercy Derkyi. "Conflict or Cooperation? Social Capital as a Power Resource and Conflict Mitigation Strategy in Timber Operations in Ghana's off-Reserve Forest Areas." *Ecology and Society* 23, no. 3 (2018). Accessed May 5, 2020. <https://www.jstor.org/stable/26799162>.
- Sandilands, Catriona. *The Good-Natured Feminist: Ecofeminist and the Quest for Democracy*. London: University of Minnesota Press, 1999.
- Sania Mashabi. "Pengesahan UU Minerba, untuk Siapa?" Online News. *KOMPAS.com*. Last modified May 14, 2020. Accessed July 16, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/06215741/pengesahan-uu-minerba-untuk-siapa>.
- Sesanti, Ardiana Dewi. *Jogja-Ku[Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa Dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Setiawan, Hersri. *Awan Theklek, Mbengi Lemek: Tentang Perempuan dan Pengasuhan Anak*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa, 1912-1926*. Translated by Hilmar Farid. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

- Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*. U.K: Zed Books, 1988.
- Soemarjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Translated by Mochtar Pabotinggi. Kedua. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Somad, Abdus. “Gaung Perempuan Menolak Sultan Ground (SG) Dan Paku Alaman Ground (PAG).” *Selamatkanbumi.Com*, July 13, 2017. Accessed September 30, 2019. <http://selamatkanbumi.com/id/gaung-perempuan-menolak-sultan-ground-sg-dan-pakualaman-ground-pag/>.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” In *Marxism and the Interpretation of Culture*, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 271–313. Basingstoke: Macmillan Education, 1988.
- Suliadi. “Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Karangwuni Kulon Progo.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 9, no. 2 (2015): 79–102.
- Suryakusuma, Julia. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Sutarni. “DPRD Kulon Progo Minta PLN Mempermudah Petani Cabai Pasang Listrik.” *Antara News Yogyakarta*. Last modified December 28, 2019. Accessed April 6, 2021. <https://jogja.antaranews.com/berita/405788/dprd-kulon-progo-minta-pln-mempermudah-petani-cabai-pasang-listrik>.
- . “Petani Pesisir Kulon Progo Panen Raya Cabai.” *Antara News Yogyakarta*. Last modified June 6, 2013. Accessed February 21, 2021. <https://jogja.antaranews.com/berita/312480/petani-pesisir-kulon-progo-panen-raya-cabai>.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Edited by H. Ahmad Tanzeh. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syaifullah, Muh. “Penambangan Pasir Besi Ancam Eksistensi Petani Kulonprogo.” *Tempo*. Last modified March 24, 2009. Accessed January 14, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/166386/penambangan-pasir-besi-ancam-eksistensi-petani-kulonprogo>.
- Syambudi, Irwan. “Terancam Tergusur, Petani Kulon Progo Sumbang Pangan Saat Pandemi - Tirto.ID.” Online News. *Tirto.id*. Accessed June 5, 2020. <https://tirto.id/terancam-tergusur-petani-kulon-progo-sumbang-pangan-saat-pandemi-eMWK>.

- Tim Penutur Selamatkan Bumi. "Amanat Gubernur DIY terkait penertiban dan penataan tanah Sultan Ground di seluruh Kabupaten Gunungkidul." *Selamatkanbumi.com*, June 22, 2016. Accessed March 26, 2021. <http://selamatkanbumi.com/id/amanat-gubernur-diy-terkait-penertiban-dan-penataan-tanah-sultan-ground-di-seluruh-kabupaten-gunungkidul/>.
- Tiwon, Sylvia. "Tanah Wutah Rah, Membongkar Mitos Dewi-Dewi yang Terperangkap." In *Ekofeminisme II: Narasi Iman, Mitos, Air & Tanah*, 51–66. II Kajian Ekofeminisme. Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
- Walliman, Nicholas. *Research Methods: The Basic*. New York: Routledge, 2011.
- Warren, Karen J. "Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical Perspective." In *Ecofeminism: Women, Culture, Nature*, edited by Karen J. Warren. United States of America: Indiana University Pres, 1997.
- Wibisono, Sri Gunawan. "Pertambangan di Kaltim di antara kerusakan lingkungan dan persawahan." *beritagar.id*. Last modified December 11, 2018. Accessed July 26, 2020. <https://beritagar.id/artikel/berita/pertambangan-di-kaltim-di-antara-kerusakan-lingkungan-dan-persawahan>.
- Wirawan, Vani. "Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 161–171. Accessed December 1, 2020. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2989>.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Verus Kebatinan*. Translated by Hairus Salim HS. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- . "The 'Slametan': Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam." *History of Religions* 28, no. 1 (August 1, 1988): 54–89. Accessed January 3, 2021. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/463136>.
- World Health Organization. "Naming the Coronavirus Disease (COVID-19) and the Virus That Causes It." *World Health Organization*. Accessed April 8, 2021. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- Yunianto, Bambang. "Kajian Permasalahan Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan Dan Pengolahan Pasir Besi Di Pantai Selatan Kulon

Progo, Yogyakarta.” *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Volume 05, Nomor 13 (2009).

Zakaria, Anang. “Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara Di Yogya.” *Tempo*. Last modified September 15, 2015. Accessed November 25, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogya>.

“Penduduk Berdasarkan Agama Semester 2 2017.” Accessed January 5, 2021. <https://satudata.kulonprogokab.go.id/opendata/index.php/resources/detil/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama/6d15cb9b-0271-4280-b374-1da7c909c124>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Miftahul Huda  
 Tempat, tanggal lahir : Demak, 31 Januari 1995  
 Alamat Asal : Jl. Kauman RT 2 RW 9, Pucanggading, Batusari,  
 Mranggen, Demak 59567  
 Ayah : Madhan  
 Ibu : Mutmainah  
 Nomor Telepon : 087719265336  
 Email : [miftahhuda1932@Gmai.com](mailto:miftahhuda1932@Gmai.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

2002-2008	SDN Batusari 01
2008-2011	SMP Futuhiyyah Mranggen
2011-2014	MA Futuhiyyah 1 Mranggen
2014-2018	Strata 1 (S1) Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2019-2021	Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Konsentrasi Islam dan Kajian Gender, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh LPM Bangkit, 2014
- b. Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh UKM UPI, 2015
- c. Kelas Menulis yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka, 2015
- d. Studi Intensif Tentang Kristen-Islam (SITKI) III yang diselenggarakan oleh UKDW, 2019
- e. Diseminasi Etnografi yang diselenggarakan oleh Satu Nama, 2019



- f. Kelas Metodologi Queer & Religion yang diselenggarakan oleh GAYa Nusantara, 2020
- g. Pelatihan Menulis Resensi dan Feature untuk Penulis yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf dan Satupena, 2020

#### C. Riwayat Pekerjaan

1. Graphic Designer, 2019-sekarang
2. Book seller, 2019-sekarang
3. Freelance Writer, 2019-sekarang
4. Kontributor Mubadalah.id, Iqra.id, Alif.id, e-Koran Telusur van Java, Arrahim.id, Metafor.id, Indoprogess.com, Alkalam.id, dll.
5. Salah satu penulis KUIPEDIA (tentang 100 Ulama Perempuan di Indonesia), 2021.

#### D. Karya Ilmiah

1. Mahar Hafalan Surat ar-Rahman Menurut Mahasiswi Unissula (Tinjauan Kemaslahatan), Skripsi, 2018.
2. Petani dalam Pusaran Modernisasi: Studi Kasus Petani Perempuan Karangsewu, Jurnal An Nisa'a Vol. 14 No. 1 (2019)
3. Empowerment Female Farmer Against Mining Capitalism, Jurnal Sawwa Vol. 15 No. 1, (2020)
4. Kebijakan Tambang dan Kerentanan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, bagian dalam buku "Ekofeminisme V" (Penerbit Parahita Press, 2020).

#### E. Karya Lainnya

1. TANDA: Antologi Cerita Pendek (Penerbit Guepedia, 2020)
2. Optimisme dalam Membangun Sebuah Negara-Bangsa: Peran Agama dalam Mewujudkan Perdamaian, dalam buku "Belajar dari Perbedaan & Saling Memperkaya" (Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2020)
3. Dua Sekoci yang Melepaskan Diri, cerpen dalam buku "Bedug, Pandemi, dan Sekoci" (Penerbit Balai Bahasa Yogyakarta, 2021)

4. Perempuan Petani Menyingkap Debu Pasir Besi, bagian dalam buku “Narasi Perempuan dan Interseksionalitas” (Penerbit Odise, 2021)

